

**STRATEGI
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN WILAYAH PERBATASAN**

Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN WILAYAH PERBATASAN



STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN WILAYAH PERBATASAN

Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah

Editor: Muhammad Sali
Proofreader: Eista Swaesti
Desain Cover: Mikah
Layout: Slamet

Penerbit:

AR-RUZZ MEDIA

Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta, 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com
ISBN: 978-602-313-484-7
Cetakan I, 2019

Didistribusikan oleh:

AR-RUZZ MEDIA

Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id
Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Muri'ah, Siti

Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan/Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah - Yogyakarta:

Ar-Ruzz Media, 2019

118 halaman, 16 cm × 25 cm

ISBN: 978-602-313-484-7

1. Pendidikan

I. Judul

II. Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurulillah penulis haturkan keharibaan Allah Swt yang senantiasa membimbing dan memberikan pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat tuntas dikerjakan. Shalawat beruntai salam tak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Rasulillah Saw yang menjadi soko guru seru sekalian alam, berkat nurnya jualah seluruh alam ini dapat berjalan sesuai dengan sunnatullah.

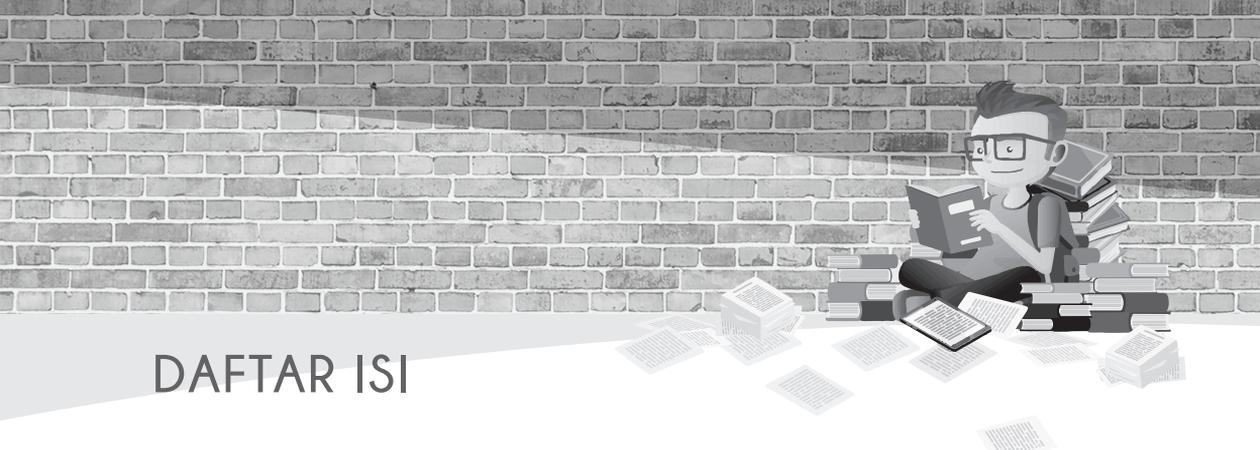
Penelitian yang diangkat merupakan penelitian yang didasari rasa kepedulian penulis terhadap pendidikan di wilayah perbatasan. Khususnya di wilayah perbatasan Kaltara, disana terdapat anak-anak TKI yang kurang terayomi kebutuhan akan pendidikan. Tentunya dibutuhkan upaya yang serius guna menyikapi hal ini, ditambha lagi rendahnya kepedulian orang tua anak-anak TKI akan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyusun strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Kaltara yakni Sebatik dan Malinau dengan melihat realitas pelaku pendidikan serta mengkobinasikan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Selain itu, penulis juga berupaya untuk melihat dan menelisis secara mendalam peluang-peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan guna turut *mensupport* [elaksanaan pendidikan di wilayah perbatasan tersebut.

Semoga semua curahan pertolongan yang diberikan secara ikhlas menjadi catatan amal kebajikan baginya.

Samarinda, Nopember 2019

Penulis





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Selayang Pandang tentang Pendidikan Perbatasan	1
B. Realitas Pendidikan Wilayah Perbatasan	5

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN WILAYAH PERBATASAN (SEBUAH IKHTIAR)	17
A. Pengembangan Wilayah Perbatasan Perspektif Kebijakan Pemerintah	17
B. Strategi Pengembangan Pendidikan	20
C. Kerangka Kerja Strategi Pengembangan Pendidikan.....	25
1. Kondisi yang Memungkinkan Kemajuan Lembaga	25
2. Kunci Dasar dalam Pengembangan Kelembagaan	26
D. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan	27
1. Pengertian Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan	27



2.	Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan	28
3.	Konsep Pengembangan Lembaga.....	30
E.	Ruang Lingkup Strategi Pengembangan Pendidikan.....	34
F.	Dimensi Manajemen Strategik	35
G.	Hierarki Strategi	41

BAB III

	IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN	45
A.	Dasar Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional.....	45
B.	Definisi dan Komponen Standar Nasional Pendidikan.....	45
C.	Implementasi SNP di Wilayah Perbatasan.....	63
1.	Standar Sarana dan prasarana.....	65
2.	Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan	67

BAB IV

	SEKOLAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA	69
A.	Kondisi Pendidikan Perbatasan.....	69
B.	Profil Sekolah Provinsi Kalimantan Utara.....	71
1.	Sekolah Tapal Batas Sebatik.....	71
2.	SMKN 1 Sebatik	72
3.	SMKN 1 Nunukan	73
C.	Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan KALTARA.	75
D.	Realitas dan Potret Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan KALTARA	83
1.	Strategi Sekolah dalam Melakukan Pengembangan	83



2. Strategi Sekolah dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat.....	86
3. Pola Pendidikan yang Diterapkan di Wilayah Perbatasan	87
4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Sekolah.....	88

BAB V

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI PERBATASAN INDONESIA (IKHTIAR PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN)	99
A. <i>Best Practicess</i> Bidang Inovasi Pendidikan di Daerah Perbatasan	99
B. <i>Best Practicess</i> Inovasi Pendidikan di berbagai Daerah	100
1. Inovasi Pendidikan Kota Surabaya	101
2. Inovasi Pendidikan Kota Blitar	102
3. Inovasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..	103

BAB VI

PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107





BAB I

PENDAHULUAN

A. Selayang Pandang tentang Pendidikan Perbatasan

Spirit pendidikan yang lebih memberikan peluang besar kepada pemerintah daerah dalam aspek manajerialnya, memberikan angin segar bagi setiap daerah. Peluang (baca: disentralisasi pendidikan) tersebut tentunya memberikan ruang gerak yang lebih dinamis kepada daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam ikhtiarnya meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan SDM dan SDA yang dimiliki. Keterlibatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sungguh sangat menentukan, utamanya dalam mengejar ketertinggalan bangsa ini dari bangsa-bangsa lain. Keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia, dan manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan itu haruslah manusia yang mempunyai kemampuan membangun. Kemampuan membangun hanya dapat dicapai melalui pendidikan.¹ Sumber daya manusia berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Hal ini, sesuai dengan visi bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut tidak terlepas dari pendidikan.

¹ M. Fakry Gaffar, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi, (Jakarta: PPLPTK, 1987), hlm. 2.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban negara melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh warganya. Begitu pula halnya ketersediaan SDA yang memadai juga menjadi salah satu faktor penentu untuk mendukung terselenggaranya berbagai kebijakan pendidikan yang direncanakan.

Kondisi nyata saat ini yang dihadapi bangsa salah satunya adalah masih rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Sementara itu sangatlah disadari bahwa kadar kualitas suatu bangsa sangat tergantung dengan kualitas pendidikan warganya. Setidaknya, untuk mengukur daya saing suatu bangsa dipengaruhi oleh tiga hal penting; pertama, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa; kedua, kemampuan manajemen suatu bangsa; ketiga, kemampuan sumber daya manusia.² Usaha yang dilakukan pemerintah dalam membangun dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia bangsa, melalui pendidikan yang dilakukan selama ini tetaplah bermakna dalam upaya pencerdasan bangsa, walau tetap saja dihadapkan/dibenturkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dan globalisasi yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Upaya pemerintah tersebut melalui pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang terdiri dari program 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama.³ Kebijakan pemerintah ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesempatan akses dan pemerataan pendidikan pada masyarakat. Hal ini juga sebagai usaha dalam mencapai pendidikan yang bermutu, beradab, dan yang dapat memanusiakan manusia perlu memperhatikan prinsip pendidikan sepanjang hayat (lifelong education) dan memperhatikan empat pilar (sendi) pendidikan, yakni: (1) *learning to know* (belajar untuk mengetahui), (2) *learning to do* (belajar dengan berbuat), (3) *learning to be*

² Anonymous, *Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan*, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam: 2004), hlm. 1.

³ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Pasal 2.

(belajar menjadi seseorang), dan (4) *learning to live together with to live others* (belajar hidup bersama) dalam pelaksanaannya.⁴

Program WAJARDIKNAS 9 Tahun ini tentunya banyak mengalami kendala, salah satu yang cukup krusial menurut peneliti adalah pemerataan pendidikan untuk wilayah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang paling terbelakang dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru. Kenyataan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pasal 34 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya, baik anak-anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban, salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membela kedaulatan negara. Namun, ketika pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negara, warga negara tersebut juga cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Contohnya adalah yang terjadi masyarakat yang berdiam di sepanjang perbatasan. Mereka lebih berinteraksi dan berorientasi kepada desa terdekat negara tetangga. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Inilah dampak buruk yang terjadi apabila pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan diabaikan, karena akan mengikis rasa nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa. Kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan, karena lambat laun rasa cinta Indonesia akan tergerus sedikit demi sedikit karena mereka lebih banyak mendapat respon positif dari negeri tetangga dalam masalah pendidikan dan masalah-masalah lainnya. Menurut Lia Rosliana dkk., Terdapat berbagai isu penting di perbatasan antara lain: Isu Batas

⁴ Mastuhu, *Menata ulang Pemikiran; Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003) hlm. 132 – 135.

Negara Pertahanan dan Keamanan Daerah Perbatasan, Isu Kelembagaan, Isu Perekonomian Masyarakat, Isu Pendidikan, Isu Infrastruktur, Isu Potensi Daerah. Keberadaan berbagai isu tersebut sebenarnya telah terjadi sekian lama, akan tetapi sampai sekarang isu-isu tersebut masih relevan di kawasan perbatasan dan menjadi bahan permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan.⁵

Tulisan ini hadir dalam rangka untuk memotret progress pendidikan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan pendidikan di perbatasan dengan berbagai kompleksitasnya. Berdasarkan pantauan peneliti, beberapa tahun belakang ini, muncul beberapa tokoh yang memperjuangkan pendidikan di wilayah tersebut. Dengan hanya bermodalkan tekad dan semangat karena rasa prihatin terhadap anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah tersebut, mereka kemudian mulai menggagagas sekolah-sekolah. Dan hingga sekarang sekolah-sekolah tersebut telah menjadi percontohan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqon. MI Darul Furqan baru beroperasi sejak tahun 2012 oleh Ibu Suraidah dan mulai menerima murid pada 2014. Setahun kemudian, pada Oktober 2015, Kementerian Agama secara resmi memberikan izin operasional sekolah. Walau begitu, Darul Furqan dirintis sejak 2012. Mulanya berupa PAUD semata. Lokasinya pun bukan di bangunan yang sekarang. Ketika pertama kali berdiri, tempat belajar-mengajar diselenggarakan di mesjid yang tak jauh dari lokasi sekolah saat ini. Terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia, Darul Furqan mendapat julukan "Sekolah Tapal Batas". Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqan Sekolah Tapal Batas (STB) yang berlokasi di Jl. Sinta Desa Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah telah hampir rampung. Ruang Kelas baru (RKB) ini dibangun dengan menggunakan anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2016. Mekanisme pembangunannya yang dilakukan secara swakelola, menghadirkan gedung RKB, yang secara fisik bangunan, terlihat cukup kokoh dan rapih. Menariknya, karena kegigihan dari Ibu Suraidah mendapat respon

⁵ Lia Rosliana dkk., "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara", *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 317.

dari berbagai kalangan, dan sekolah tersebut sekarang bertambah maju dan berkembang. Selain itu, peneliti juga akan meneliti sekolah-sekolah lainnya yang dianggap memiliki peran di wilayah perbatasan, seperti Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Yayasan Islam Indonesia Pulau Sebatik (YIIPS) yang juga memiliki kiprah positif untuk mendidik anak-anak yang orang tuanya menjadi TKI di negeri Malaysia.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengembangkan beberapa aspek kajian, yaitu: (1) Strategi sekolah dalam melakukan pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan; (2) Strategi sekolah dalam membangun kemitraan dengan masyarakat; (3) Pola pendidikan yang diterapkan di wilayah perbatasan, dan (4) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar tergalikan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah serta strategi pengembangan yang disusun oleh sekolah serta menjadikan sekolah-sekolah perbatasan tersebut sebagai model pengembangan sekolah-sekolah lainnya untuk pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan khususnya di wilayah perbatasan.

B. Realitas Pendidikan Wilayah Perbatasan

Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang paling terbelakang dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru. Kenyataan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pasal 34 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya, baik anak-anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban, salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membela kedaulatan negara. Namun, ketika pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negara, warga negara tersebut juga cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Contohnya adalah yang terjadi masyarakat yang berdomisili di sepanjang

perbatasan. Mereka lebih berinteraksi dan berorientasi kepada desa terdekat negara tetangga. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Inilah dampak buruk yang terjadi apabila pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan diabaikan, karena akan mengikis rasa nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa.

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat komprehensif (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya.⁶ Jika memotret problematika pendidikan di wilayah perbatasan, menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, antara lain:

1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara;
2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya;
3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas;

⁶ Peraturan NOMOR :3 TAHUN 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011, hlm. 2-3.

4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (*growth center*) di kawasan perbatasan;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;
7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (*basic services*) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan;
8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan ilegal dan merugikan kepentingan nasional;
9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37 Kementerian/LPKN);
10. Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulau-pulau kecil terluar yang belum memadai;
11. Paradigma perbatasan yang dipandang sebagai “halaman belakang”, sehingga belum menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah;
12. Terjadinya kesenjangan dengan negara tetangga;
13. Adanya pelintas batas tradisional yang tidak memenuhi kaidah customs, quarantines, immigrations dan security (CIQS);
14. Adanya tanah adat/ulayat yang kepemilikannya bersifat lintas batas Negara;
15. Terbatasnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan aparat yang bertugas di perbatasan;
16. Terjadinya berbagai kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum;
17. Belum optimal kerjasama antar Negara dalam penyelesaian berbagai permasalahan di perbatasan.⁷

Berkaitan dengan problematika pendidikan menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), “Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah

⁷ Peraturan NOMOR :3 TAHUN 2011 tentang Rencana Aksi.

Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.”

Berdasarkan survei PERC dalam diatas, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus membenahi sistem pendidikan agar lebih berkualitas, guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi-potensi baru untuk membangun negara agar lebih maju. Namun pendidikan di Indonesia belum ada pemerataan. Banyak ketimpangan terjadi, pendidikan di kota-kota besar lebih berkualitas, baik pembelajaran maupun fasilitasnya. Keadaan ini berbalik dengan pendidikan di daerah perbatasan yang sangat memprihatinkan. Seperti di Pulau NTT, NTB, Maluku, Papua, dan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Di pulau-pulau tersebut kondisi dan kualitas pendidikan masih sangat minim. Seperti akses untuk mencapai ke sekolah mengharuskan para siswa berjalan lebih kurang 1-2 jam dengan jarak sampai 5-6 kilometer. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di negeri tetangga dengan alasan lebih dekat jarak tempuhnya.

Kondisi dan kualitas tenaga pendidik di sekolah daerah perbatasan memprihatinkan, karena para guru hanya guru honorer belum berstatus PNS(Pegawai Negeri Sipil). Para guru tersebut mengajar 2-3 kelas, dengan gaji setiap bulannya 100.000-300.000 rupiah. Terkadang pengajar di sekolah tersebut bukan guru, namun para TNI. Jelas kita tidak boleh mengandalkan para TNI untuk mengajar di daerah perbatasan sebab pendidikan berkualitas nanti sulit dicapai.⁸

Terdapat lima faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di daerah perbatasan⁹, sebagai berikut :

⁸ Mengutip Ines Rendra, “Potret Pendidikan Indonesia di Wilayah Perbatasan”, http://inesrendrakus.blogspot.com/2014/12/makalah-potret-pendidikan-indonesia-di_0.html, diakses pada tanggal 12 September 2018.

⁹ Afandi. 2013. Pendidikan di Daerah Perbatasan : Terdepan Sekaligus Terbelakang, (Online), <http://pandifkipuntan.wordpress.com/tag/httpsajidan-staff-fkip-uns-ac-id/>, diakses tanggal 12 September 2018.

1. Jumlah Tenaga Pendidik

Dalam proses pembelajaran keadaan dan kualitas guru sangat menentukan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Di daerah perbatasan hanya 1-2 guru tetap, selain itu merupakan guru honorer atau kontrak. Banyak guru yang menolak mengajar di daerah perbatasan karena letak geografis, sulitnya aksesibilitas menuju ke daerah tersebut, dan tidak ada kejelasan status apakah setelah dikirim ke daerah tersebut mereka menjadi PNS atau tidak.

2. Kesejahteraan Guru

Dengan pendapatan yang diperoleh rendah seperti ketidakjelasan dalam hal tunjangan yang diberikan pemerintah melalui tunjangan profesi dan tunjangan khusus menjadikan rendahnya kesejahteraan guru di daerah perbatasan. Dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Tenaga Khusus, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan diberi tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan". Tenaga pendidik di daerah perbatasan termasuk dalam kriteria daerah khusus, berikut kriteria dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Tenaga Khusus:

- a. sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau
- b. Sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Tetapi dalam kenyataan tunjangan tersebut belum sampai ke tangan para guru di daerah perbatasan, masih banyak mengalami hambatan dan kendala dari pemerintah itu sendiri. Seharusnya pemerintah segera turun tangan mengecek oknum-oknum mana yang telah menyalahgunakannya sehingga belum sampai ke tangan para guru tersebut.

3. Kualitas Sarana Fisik

Sarana fisik yang merupakan sarana dan prasarana salah satu faktor utama penunjang berjalannya proses pendidikan. Masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak pakai dan fasilitas yang ada kurang memadai, seperti : kelengkapan buku paket dan alat-alat praktikum. Kedua komponen tersebut sangat berpengaruh dalam kelancaran proses pembelajaran. Potret tempat pendidikan seperti ini banyak terjadi di daerah perbatasan, “gubug-gubug” yang mereka tempati untuk sekolah sangat berbanding terbalik dengan gedung-gedung sekolah di perkotaan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan dana BOS(Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa digunakan untuk membangun sekolah serta melengkapi fasilitasnya, namun tidak begitu nyata dirasakan dampaknya oleh masyarakat atau sekolah-sekolah di daerah perbatasan, bahkan dana tersebut jarang sampai ke tangan mereka. Maka pemerintah harus mengecek secara teliti laporan penyampaian dana BOS.

4. Kesempatan Pemerataan Pendidikan

Setiap warga Indonesia memiliki kesempatan dalam hal memperoleh pendidikan. Namun dalam hal pemerataan pendidikan dinilai masih kurang. Seharusnya sistem pendidikan nasional mampu menyediakan pemerataan pendidikan untuk semua warga negaranya. Adapun wajib belajar 9 tahun dengan biaya gratis, namun di daerah perbatasan rata-rata anak hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 6tahun, karena untuk melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) memerlukan jarak tempuh yang jauh dan masih terbatasnya jumlah sekolah lanjutan tersebut. Hal ini yang menjadikan semangat para siswa untuk melanjutkan ke SMP maupun SMA masih rendah. Kondisi tersebut nantinya akan menghambat pengembangan sumber daya manusia. Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) pemerintah sudah diamanatkan, antara lain:



- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti,
 - b. meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni.
5. Budaya Pendidikan Masih Rendah

Ada sebagian masyarakat di daerah perbatasan yang berpikir tidak perlunya suatu pendidikan, mereka masih terpengaruh oleh budaya nenek moyang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan saat ini, diperlukan adanya sosialisasi di daerah perbatasan tersebut bahwa pendidikan sangat penting untuk kehidupan kelak.

Budaya pendidikan dalam konteks perbatasan bertalian dengan kesadaran masyarakat perbatasan tentang urgensi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang.¹⁰ Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan

¹⁰ Smavo, "Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang", <https://sman2cibinong.sch.id/pendidikan-sebagai-investasi-jangka-panjang/>.

dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini. Di Amerika Serikat seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama struktur ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya rata-rata, antara pedesaan dan perkotaan, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD hanya 1,1 juta rupiah.

Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20 % dibanding 15 %. Sementara itu di negara-negara maju nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik yaitu 9 % dibanding 13 %. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi.¹¹

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah 15 %, dan pendidikan tinggi 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

¹¹ Ace Suryadi, *Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1999), hlm. 247.

seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Melihat kenyataan ini maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Pada tahun 1995/1996 misalnya, alokasi biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk Sekolah Dasar Negeri per siswa paling kecil yaitu rata-rata hanya sekira 18.000 rupiah per bulan, sementara itu biaya pendidikan per siswa di Perguruan Tinggi Negeri mendapat alokasi sebesar 66.000 rupiah per bulan. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk pendidikan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa kajian yang menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan (dasar vs tinggi) juga didasarkan pada kekuatan ekonomi siswa (miskin vs kaya). Artinya siswa di PTN yang berasal dari keluarga kaya harus dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model yang ditawarkan ini sesuai dengan kriteria equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan UNESCO. Itulah sebabnya Profesor Kinoshita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan

dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin.¹² Fungsi politis merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau

¹² Yin Cheong Cheng, *School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development*, Washington D.C: The Palmer Press, 1996, h.7

menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.

Fungsi kependidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Pada tingkat individual pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar.

Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi/uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri.

Mindset ini, seyogianya juga dapat terbangun pada masyarakat perbatasan sehingga proses percepatan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut dapat berjalan maksimal.





BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN WILAYAH PERBATASAN (SEBUAH IKHTIAR)

A. Pengembangan Wilayah Perbatasan Perspektif

Kebijakan Pemerintah

Kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Definisi kawasan perbatasan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yaitu merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan perbatasan dengan beberapa negara baik darat, laut, maupun udara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Wilayah Negara, bahwa di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di wilayah laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan Indonesia di wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan

batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Berdasarkan data Daerah Tertinggal dan Perbatasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bahwa daerah di Indonesia yang termasuk dalam kawasan perbatasan pada tahun 2015 adalah sebanyak 43 kabupaten. yang tersebar di 13 Provinsi, sebagai berikut : (1) Aceh : Aceh Besar, Kota Sabang; (2) Riau : Rokan Hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan; (3) Kepulauan Riau : Karimun, Kota Batam, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna; (4) Sumatera Utara : Serdang Bedagai; (5) Nusa Tenggara Timur : Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, Malaka; (6) Kalimantan Barat : Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau; (7) Kalimantan Utara : Nunukan, Malinau; (8) Kalimantan Timur : Mahakam hulu, Berau; (9) Sulawesi Utara: Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talud; (10) Maluku : Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya; (11) Maluku Utara : Pulau Morotai; (12) Papua : Keerom, Pegunungan Bintang, Supiori, Kota Jayapura, Merauke, Boven Digoel; (13) Papua Barat : Raja Ampat.¹³ Sedangkan data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang memiliki tugas kewenangan untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, mencatat ada 187 Kabupaten/ Kota di 13 Provinsi yang berbatasan dengan negara lain, yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri) Pemerintah sejak tahun 2010 hingga 2019.¹⁴

Salah satu isu strategis dalam pembangunan di lokasi kawasan perbatasan adalah kendala dalam peningkatan akses infrastruktur di kawasan

¹³ Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, "Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (Perbatasan) Tahun 2015", <http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2015/07/Daftar-Daerah-3T-2015.pdf> (diakses 3 Maret 2018).

¹⁴ Yadi, et al., Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 Welfare Indicators 2015, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015), hlm. 4.



perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Keterbatasan akses infrastruktur perbatasan terutama mencakup transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan pada awalnya berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking”. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan pada RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai garda depan negara, juga sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertahanan keamanan nasional.¹⁵ Dengan demikian pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*)¹⁶, dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).¹⁷ Kajian terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dalam perspektif hukum masih belum banyak ditemukan terlebih lagi yang dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, padahal pengembangan infrastruktur sangat diperlukan di kawasan perbatasan karena merupakan bagian dari kendala utama pembangunan kawasan perbatasan selain dari kendala kualitas SDM, kedaulatan pertahanan dan keamanan, serta sosial ekonomi.

¹⁵ Yadi, et al., Indikator Kesejahteraan Rakyat..., hlm. 21-22.

¹⁶ Nike K. Rumokoy, “Peranan Hukum Agraria Dalam Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain Di Tinjau Dari Aspek Ketatanegaraan” Jurnal Universitas Samratulangi, Vol. I No. 6 Edisi Khusus Oktober-Desember (2013): 17, <http://repo.unsrat.ac.id/442/> (diakses 24 September 2016).

¹⁷ Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, “Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025”, E-Book (2013) http://bnpp.go.id/images/arsip/ebook/gd_bnpp_2011/Gran_Design_BNPP_2011.pdf (diakses 3 Oktober 2016), hlm. 3.

B. Strategi Pengembangan Pendidikan

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan *strategy* yang berarti ilmu siasat.¹⁸ Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang artinya “*a general set of maneuvers cried out over come a enemy during combat*” yaitu semacam ilmunya para jenderal untuk memenangkan pertempuran.¹⁹ Sedangkan dalam kamus Belanda-Indonesia, *sertategis* berasal dari kata majemuk, yang artinya siasat perang, istilah strategi tersebut digunakan dalam kemiliteran sebagai usaha untuk mencapai kemenangan, sehingga dalam hal ini diperlukan taktik serta siasat yang baik dan benar.²⁰

Ada beberapa pendapat lain tentang pengertian strategi, antara lain:

1. Strategi didefinisikan sebagai garis besar haluan Negara bertindak untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.²¹
2. Arifin Memberikan pengertian strategi adalah sebagai segala upaya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai hasil secara maksimal.²²
3. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu.²³

Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²⁴ Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi paling menguntungkan sebelum pertempuran aktual

¹⁸ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 701.

¹⁹ John M Bryson, *Perencanaan Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. XVI.

²⁰ Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1388.

²¹ Tabrani Rusyah, Atang K. BA, Zainal A, *Penekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1992), 209.

²² H. M. Arifin, *Ilmu pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan raktis Berdasarkan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 58.

²³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet II, 1989), hlm. 859.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 423.

dengan musuh.²⁵ Sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy, "Perencanaan Pajak". Menurut Jaunch and Glueck, strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Strategi ialah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaia.²⁶ Sebagaimana dikutip oleh Husein Umar "*Strategic Managemen In Action*". Menurut Sukristono, Strategi adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan.²⁷ Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competition*).²⁸

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.²⁹ Strategi memiliki hirarki tertentu. Pertama adalah strategi tingkat korporat. Strategi

²⁵ M. Suyanto, *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 16.

²⁶ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, h. 2.

²⁷ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31.

²⁸ Husein Umar, *Strategic Management ...*, hlm. 33.

²⁹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 14.

korporat, menggambarkan arah pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha dalam sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa yang dihasilkan. Kedua adalah strategi tingkat unit usaha (bisnis). Strategi unit usaha biasanya menekankan pada usaha peningkatan daya saing organisasi dalam satu industri atau satu segmen industri yang dimasuki organisasi yang bersangkutan. Ketiga strategi tingkat fungsional. Strategi pada tingkat ini menciptakan kerangka kerja bagi untuk manajemen fungsional seperti produksi dan operasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian dan inovasi (research and innovation).³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut.

Sehubungan dengan strategi pengembangan pendidikan, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dan pengelolanya dalam usahanya setiap hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.³¹ Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.³² Pada penelitian AY Lubis, menurut Hafsa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan menurut Mangkuprawira menyatakan bahwa pengembangan merupakan

³⁰ Diah Tuhfat Yoshida, *Arsitektur Strategik: Sebuah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah*, (Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 26.

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 538.

³² Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 168.



upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.³³ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang memberikan informasi, pengarahannya, pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha.

Menurut Iskandar Wiryokusumo pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prskarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesame, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan prbadi yang mandiri.³⁴ Arifin, Berpendapat bahwa pengembangan bila dikaitkan dengan pendidikan berarti suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas dan mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.³⁵

Sedangkan strategi dasar dari setiap usaha itu mencakup 4 hal yang diungkapkan oleh Newman dan Logan dalam bukunya yang berjudul "Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar" sebagai berikut:

³³ AY Lubis, Pengembangan Usaha, repository.usu.ac.id>bitstream, pdf, hlm. 9.

³⁴ Iskandar Wiryokusumo, J. Mandilika, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 93.

³⁵ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 208.

1. Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi serta kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadikan sasaran usaha dengan memperhatikan aspirasi dan selera masyarakat.
2. Pertimbangan dan pemilihan jalan pendekatan yang ampuh dalam mencapai sasaran.
3. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencapai sasaran.
4. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur yang baku untuk mengukur tingkat keberhasilan.³⁶

Apabila keempat unsur dalam strategi dasar itu diterapkan dalam pendidikan maka akan sejalan dengan pola dasar PPSI, yang menggambarkan sebagai berikut:

1. Karena dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka identifikasi secara spesifik terhadap perubahan tingkah laku dan pribadi peserta didik seperti apa dan bagaimana yang harus dicapai dan menjadi sasaran.
2. Memilih system pendekatan belajar mengajar utama yang dipandang efektif dalam mencapai sasaran yang diinginkan dan menjadi pegangan para pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
3. Memilih serta menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang efektif dan efisien yang juga dipakai pegangan dalam mengajar.
4. Yang terakhir menetapkan norma-norma dan batas minimum keberhasilan, atau criteria keberhasilan, yang menjadikan sempurna system instruksional yang berhubungan secara menyeluruh.³⁷

Dengan demikian strategi pendidikan adalah seni mendayagunakan suatu factor untuk mencapai sasaran dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada menyangkut juga masalah mengenai hambatan-

³⁶ Tabrani Rusyah, Atang K. BA, Zainal A, *Penekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1992), hlm. 213.

³⁷ Tabrani Rusyah, Atang K. BA, Zainal A, *Penekatan Dalam Proses...*, hlm. 213.



hambatan fisik maupun non fisik.³⁸ Apabila ditelaah lebih dalam strategi diatas menyelesaikan atau meminimalkan masalah serta hambatan dalam pendidikan, juga termasuk salah satu strategi yang dapat dipakai untuk membawa pendidikan ke arah perkembangan selanjutnya. Dalam pembahasan yang sama dalam hal ini “Mughtar Buchori” juga memberi beberapa pemikiran tentang strategi yang dipakai dalam menghadapi masalah dalam pendidikan, yaitu 2 strategi dalam hal ini:

1. Strategi pengembangan system, yang berisi langkah-langkah dasar yang dapat kita tempuh untuk mendorong berbagai lembaga pendidikan untuk saling bersentuhan, saling mengenal, saling membantu dan saling mendekati.
2. Strategi pengarahan system, yang berisi langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk meletakkan hubungan langsung antara program pendidikan yang diselenggarakan oleh setiap lembaga pendidikan dengan sejumlah persoalan pembangunan nyata yang terdapat dalam masyarakat.³⁹

C. Kerangka Kerja Strategi Pengembangan Pendidikan

1. Kondisi yang Memungkinkan Kemajuan Lembaga

Beberapa kondisi yang dapat diciptakan dalam rangka membuka peluang guna memajukan sebuah lembaga pendidikan, dapat ditempuh dengan beberapa alternatif cara, sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan dan Pembaruan yang efektif, Langkah yang seharusnya diterapkan dalam lembaga ialah mengubah perilaku terhadap pengembangan lembaga, menciptakan Visi lembaga, dan mengembangkan Lembaga Pembelajaran
- b. Kepemimpinan Pembelajaran yang Efektif, Dengan mengembangkan lembaga dengan merubah perilaku dalam pengembangan lembaga

³⁸ H. M. Arifn. Med, *Ilmu pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan Praktis Berdasarkan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 60.

³⁹ Mughtar Buchori, *Pendidikan Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja, 1994), hlm. 12.

juga perlu pemberdayaan guru. Dan guru perlu mendapat dukungan dari para staf-staf pengajar agar mendapatkan pandangan baru. Dan guru perlu meningkatkan sumber belajar siswa.

- c. Kepemimpinan Staf yang efektif ialah mencerminkan dan menerapkan komunikasi terbuka kepada seluruh siswa maupun kepada para staf-staf pengajar. Keputusan dalam sebuah permasalahan juga perlu di ambil dengan kesepakatan bersama dan mempunyai tanggung jawab bersama.⁴⁰

2. Kunci Dasar dalam Pengembangan Kelembagaan

Ada delapan kunci dasar dalam pengembangan kelembagaan, yaitu:

- a. Hanya ada 2 jenis lembaga: lembaga yang meningkat dan lembaga yang menurun
- b. Setiap lembaga dapat ditingkatkan tanpa memperhatikan tingkat keberhasilannya pada saat ini
- c. Potensi untuk maju sudah ada di tiap-tiap lembaga
- d. Pada peningkatan lembaga semua orang dewasa yang terlibat merupakan faktor yang penting
- e. Peningkatan lembaga adalah proses bukan peristiwa
- f. Orang yang bekerja di lembaga; guru staf, tata usaha, staf pendukung serta pihak lainnya berada pada posisi terbaik dalam mengatur proses pembaharuan
- g. Guru dan staff tata usaha telah melakukan yang terbaik untuk semua kondisi yang dihadapi
- h. Pembaharuan internal membutuhkan diadakan dan dipertahankannya pembicaraan mengenai peningkatan lembaga.⁴¹

⁴⁰ Syaiful Sagala, *Konsep Dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 57.

⁴¹ Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 243.

D. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan

1. Pengertian Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian strategi pengembangan lembaga pendidikan antara lain:

a. Menurut Mut Christine S Becker

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah proses perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi secara keseluruhan.

b. Menurut Richard Beckhard

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa teknik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku.⁴²

c. Menurut James L Gibson

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah suatu proses yang meningkatkan efektifitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu system total sepanjang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.⁴³

d. Menurut Miles and Schmuch

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku guna pengembangan sistem dengan menggunakan metode-metode refleksi dan analisis diri.⁴⁴

⁴² Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi ...*, hlm. 244.

⁴³ James L Gibson, Ter Djoerban Wahid, *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Dan Proses*, (Jakarta:erlangga,1990), hlm. 658.

⁴⁴ Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 109.

Sedangkan pengertian lembaga pendidikan menurut Hasbullah adalah wadah atau tempat suatu proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan.⁴⁵

Menurut Muhaimin lembaga pendidikan adalah organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga baik yang permanent maupun yang berubah-ubah dan mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan tersendiri.⁴⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh wadah atau tempat guna proses suatu perubahan berencana yang memerlukan dukungan semua pihak, antara lain Kepala sekolah, guru, dan siswa dengan perubahan-perubahan itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan, yang memerlukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan

a. Pandangan Terhadap Pendidikan

Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus mendidik manusia agar menjadi manusia dewasa melalui proses pendidikan. Sejak lahir manusia telah memiliki potensi dasar yang universal yang berupa :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk (*moral identity*).
- 2) Kemampuan dan kebenaran untuk perkembangan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya (*individual idendivity*).

⁴⁵ Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 127

⁴⁶ Mujib, *Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999), hlm. 286.

- 3) Kemampuan untuk berkembang dan kerja sama dengan orang lain (*social identity*).
 - 4) Adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain (*individual differences*).
- b. Memenuhi kebijakan Depdiknas dan masyarakat
- Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini dapat mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Kewenangan pengelolaan yang bertumpuh pada kebutuhan sekolah ini dipandang memiliki beberapa tingkat efektifitas yang tinggi seperti: (1) kebijaksanaan dan kewenangan sekolah berpengaruh langsung dengan siswa, orang tua dan guru (2) selalu bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya sekolah (3) efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah (4) adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, pengembangan sekolah, dan perubahan perencanaan.⁴⁷
- c. Perubahan sosial demografis didalam masyarakat
- Di era globalisasi ini sudah dipastikan perubahan yang signifikan didalam masyarakat baik yang berupa aspek social maupun aspek budaya. Perubahan itu sebagai efek dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan terus berkembang. Perubahan tersebut tentunya turut menciptakan karakteristik masyarakat, hal inilah yang menyebabkan budaya saat ini disebut budaya tanpa kompetisi. Kompetisi sendiri merupakan prinsip baru karena dunia

⁴⁷ Nanang fatah, *Managemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 14-15.

terbuka dan bersaing untuk melaksanakan sesuatu yang lebih baik seperti semboyan “esok Pasti lebih baik dari hari ini”.⁴⁸

d. Pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menimbulkan berbagai perubahan disegala aspek kehidupan. Perubahan tersebut menyebabkan sesuatu yang sebelumnya paling baik berubah menjadi biasa-biasa aja, dan sesuatu yang sebelumnya relevan menjadi tidak relevan, hal tersebut juga terjadi di dunia pendidikan. Adapun dampak perkembangan iptek dibidang ilmu pendidikan adalah dikembangkannya berbagai metode belajar yang lebih sesuai, efektif dan efisien.

Ilmu pendidikan juga banyak mendapatkan mafaat dari hasil perkembangan teknologi dengan cara dimanfaatkanya alat-alat baru dalam prosese belajar mengajar. Penemuan-penemuan baru tentang audiovisual aid, penemuan itu telah banyak membantu guru dalam memberikan materi dan pengalaman kepada anak didik.⁴⁹

3. Konsep Pengembangan Lembaga

Secara garis besar konsep pengembangan lembaga dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu: the Mitra and interpersonal techniques yaitu teknik analisa perorangan dan hubungan antar perseorangan. Dilihat secara histories, analisa hubungan antar-perseorangan mulanya dikenal dalam “T-group” atau “Sentivity Training” atau Latihan Kepekaan. Dalam perkembangannya lebih lanjut, maka dipergunakan pula dalam konsepsi Pembentukan team (*Team Building*), teknik laboratorium (*Laboratory Techniques*), dan *encounter groups*. Sentivity Training atau Latihan Kepekaan merupakan teknik pengembangan Organisasi yang paling umum digunakan. Pada dasarnya latihan kepekaan adalah

⁴⁸ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Revormasi Pendidikan Dalam Perspektif Abad 21*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 35.

⁴⁹ Burhanuddin Salam, *Pengantar Paedagogik, Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 127.

suatu interaksi dalam kelompok kecil yang terjadi dalam suasana yang tertekan, sehingga menuntut setiap orang untuk peka kepada perasaan orang lain sebagai usaha untuk menciptakan kegiatan kelompok yang memadai.

Dalam suasana seperti ini, mereka didorong untuk melakukan penilaian mengenai konsepsi 'diri sendiri' dan usaha untuk mau mendengar pendapat dan merasakan perasaan orang lain. Melalui semua ini, mereka akan dapat memahami bagaimana proses mereka berinteraksi, bagaimana budaya mempengaruhinya dan bagaimana mengembangkan keterampilan untuk bekerjasama dengan orang lain. secara singkat, tujuan dari latihan kepekaan adalah untuk lebih mengerti diri sendiri, orang lain, memahami proses yang terjadi dalam kelompok dan mengerti pengaruh dari kebudayaan dan akhirnya mengembangkan kemampuan berperilaku yang sehat.⁵⁰

W. Jack Duncan, seperti yang dikutip dalam bukunya, mengemukakan beberapa hasil yang dapat dicapai melalui latihan kepekaan, yaitu:22

- a. Meningkatkan pengertian, pemahaman dan kepekaan terhadap perilaku sendiri.
- b. Meningkatkan pengertian dan kepekaan terhadap perilaku orang lain.
- c. Lebih mengerti dan memahami proses yang terjadi dalam antar kelompok.
- d. Meningkatkan keterampilan dalam mengadakan diagnosa situasi yang terdapat dalam kelompok.
- e. Meningkatkan kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dipelajari ke dalam bentuk tindakan nyata.
- f. Meningkatkan kemampuan mengadakan hubungan antar manusia, sehingga dapat berinteraksi dengan lebih menyenangkan dan memuaskan.⁵¹

⁵⁰ Adam Ibrahim Indrawijaya, MPA., *Perilaku Organisasi*. 1989 (Bandung. PT. Sinar Baru Bandung), hlm. 252.

⁵¹ Adam Ibrahim Indrawijaya, MPA., *Perilaku Organisasi...*, hlm. 252.

Keberhasilan suatu latihan kepekaan sangat ditentukan oleh beberapa factor yaitu:

- a. Gaya memimpin sang instruktur sering mempengaruhi pendapat para peserta mengenai dirinya. perasaan disepelekan atau daciuhkan sering sekali terjadi pada permulaan latihan kepekaan.
- b. Makin akrab hubungan antara instruktur dengan para peserta latihan, makin besar kemungkinan latihan kepekaan berhasil.
- c. Makin tebal rasa saling mempercayai antara sesama peserta latihan makin leluasa mereka mengetengahkan pendapat atau perilakunya.

Integrating individuals and organizations, ialah teknik pengintegrasian manusia dengan oraganisasi, mencakup dua teknik pokok yaitu "*Job Enrichment*" dan "*management by Objectives*". teknik "*Job Enrichment*" merupakan perluasan konsesi "*Job Enlargement*" atau perluasan Kerja. Teknik perluasan kerja terutama berkaitan dengan usaha menambah ruang lingkup pekerjaan, sedangkan *job enricment relative* lebih luas dari itu, yaitu selain ada penambahan ruang lingkup pekerjaan, juga ada penambahan tantangan, penghargaan dan tanggung jawab kerja.

- a. Para pegawai menginnkan adanya kesempatan dan tantangan untuk berkembang, tetapi sering organisasi hanya memberikan tugas-tugas yang sederhana.
- b. Para pegawai ingin diperlakukan secara adil dan mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapat, tetapi organisasi sering menggunakan pendekatan structural dengan menekankan pada status yang berbeda dan saluran perintah.
- c. Para pegawai merasa terikat kepada suatu organisasi karena factor kepentingan pekerjaan dan perlakuan para manajer kepada mereka, tetapi organisasi lebih banyak memberikan perhatian pada factor lingkungan.

Teknik *Job Enrichment* ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai merencanakan sendiri pekerjaannya.



Dengan demikian, ia dapat menentukan kapan ia menyelesaikannya. Atau cara lain yang senada dengan itu. Teknik manajemen berdasarkan sasaran dilakukan dalam dua kegiatan utama, yaitu pada kegiatan perencanaan dan pada kegiatan evaluasi. pertama, para manager dan bawahannya mengadakan pertemuan atau berdiskusi untuk menentukan sasaran yang akan dicapai berdasarkan kebijakan organisasi secara keseluruhan. pada kesempatan itu pula secara bersama ditentukan: Apa yang akan dilakukan oleh para bawahan, kapan hal tersebut akan selesai dan bagaimana hasil pelaksanaannya akan dinilai bila waktu yang sudah ditetapkan secara bersama sudah habis, manager dan bawahan mengadakan diskusi kembali untuk menilai hasil pekerjaan dan juga untuk menentukan sasaran berikutnya. The confrontation meeting”, teknik ini merupakan teknik baru pengembangan organisasi. Teknik ini diselenggarakan melalui suatu pertemuan satu hari yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam organisasi. dalam pertemuan itu diharap pula dapat dirumuskan beberapa cara pemecahan masalah. Dalam pertemuan tersebut, pucuk pimpinan organisasi dengan bantuan konsultan memberikan alasan dan latar belakang pertemuan tersebut. ada waktu itu pula pimpinan organisasi perlu lebih menegaskan pentingnya keterbukaan. Setelah selesais pengarahan tersebut dan mengidentifikasi pula berbagai persoalan, maka dibentuklah beberapa kelompok yang keanggotaannya terdiri atas para pegawai yang berasal dari berbagai unit.

Kelompok-kelompok ini kemudian secara husus mendirikan segala persoalan yang tadinya sudah dikeukakan oleh pimpinan organsasi, dan jangka waktu untuk diskusi ditentukan nsetelah waktu ini habis, semua kelompok berkumpul kembali untuk mendengarkan laporan setiap kelompok. Berdasarkan laporan inilah disusun klasifikasi persoalan, termasuk mengkategorikan tingkat pentingnya berbagai persoalan, termasuk menkategorikan tingkat pentingnya berbagai persoalan, penyusunan perencanaan pemecahannya dan beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut. Kemudian

kelompok menganalisa lebih lanjut dan secara periodik memberikan laporan kepada pimpinan.⁵²

Sedangkan Jenis–Jenis Lembaga Pendidikan ialah :

a. Lembaga Pendidikan Formal (LPF)

Adalah tempat yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang dan dapat membina generasi muda, yang merupakan lembaga Pendidikan Formal adalah sekolah.⁵³

b. Lembaga Pendidikan Non Formal (LPNF)

Adalah semua bentuk Pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan berencana, di luar kegiatan persekolahan.

c. Lembaga Pendidikan In Formal (LPIF)

Adalah pendidikan yang berlangsung di tengah keluarga.⁵⁴ Kegiatan pendidikan ini tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, (tak terbatas), dan tanpa adanya evaluasi. Tetapi Pendidikan in formal ini tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang/peserta didik dan pendidikan ini berlangsung di dalam keluarga.

E. Ruang Lingkup Strategi Pengembangan Pendidikan

Manajemen strategik melibatkan proses perencanaan melalui dua tahap (komponen) perencanaan (Gunawan 2009), yakni:

1. Komponen perencanaan strategis meliputi proses perumusan: visi, misi, tujuan strategik, dan strategi utama (strategi umum).

Perumusan visi misi organisasi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakteristik rumusan visi misi tersebut. Visi merupakan sudut pandang ke masa depan organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan misi organisasi merupakan

⁵² Adam Ibrahim Indrawijaya, MPA., *Perilaku Organisasi...*, hlm. 258.

⁵³ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 162.

⁵⁴ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan...*, hlm. 169.

keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan, berupa kegiatan apa, yang sedang atau segera dilaksanakan untuk suatu organisasi. Visi sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan sekolah dikomunikasikan kepada *stakeholders*.

Misi merupakan tugas sekolah untuk mewujudkan visi lembaga yayasan dan sekolah, yang umumnya ditandai dengan kata mewujudkan. Perumusan visi dan misi sekolah berfungsi sebagai acuan dan mempermudah penetapan kebijakan sekolah, karena visi dan misi merupakan gambaran atau cita-cita ke depan sekolah. Visi dan misi sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan sekolah.

2. Komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi.

F. Dimensi Manajemen Strategik

Gunawan menjelaskan sebagaimana dikutip Sagala, Manajemen strategik memiliki dimensi yang bersifat multidimensional, yaitu:

1. Dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategi berorientasi kepada sasaran jangka panjang. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih di masa depan. Durasi waktu rencana strategik tersebut bahkan dapat berkisar antara 25-30 tahun ke atas,
2. Dimensi internal dan eksternal,
3. Dimensi pendayagunaan sumber-sumber,
4. Dimensi multibidang,
5. Proses dalam Manajemen Strategik.⁵⁵

Dalam melaksanakan manajemen strategik, saat ini telah berkembang dari suatu manajemen strategik yang tradisional ke arah suatu sistem

⁵⁵ Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 34.

manajemen bersifat kontemporer. Sistem manajemen strategik kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem manajemen tradisional. Sistem manajemen tradisional hanya berfokus pada sasaran-sasaran yang bersifat efisiensi keuangan, sedangkan sistem manajemen kontemporer mencakup 4 (empat) perspektif yaitu mencakup perspektif efisiensi keuangan, proses layanan internal, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan layanan jasa.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan manajemen strategik adalah menggunakan empat komponen manajemen strategik, yaitu:

1. Analisis potensi dan profil satuan pendidikan (sekolah/madrasah) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan;
2. Analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan;
3. Menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan;
4. Menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah (Kusmana. 2009)

Berdasarkan pandangan manajemen strategik kontemporer diperlukan keseimbangan antara efisiensi keuangan dengan proses layanan. Peningkatan pembiayaan harus diiringi dengan peningkatan proses layanan, misalnya dengan menggunakan sarana teknologi atau media lain yang menjadikan proses layanan lebih simpel, cepat, dan akurat. Peningkatan pembiayaan harus sejalan dengan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin meningkat pula jumlah pelanggan karena mereka merasa puas dengan layanan yang diberikan. Peningkatan pembiayaan harus diiringi pula dengan penambahan atau pertumbuhan layanan jasa. Peningkatan pembiayaan yang dapat meningkatkan proses layanan dan kepuasan pelanggan seharusnya menumbuhkan jenis layanan jasa lainnya (difersifikasi) layanan jasa pendukung pendidikan.



Manajemen strategik kontemporer di atas dapat diterapkan pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah/pesantren/pusat kegiatan belajar masyarakat). Penerapan manajemen strategik ini dapat mendorong satuan pendidikan dalam menjalankan program peningkatan mutu pendidikan.

Manajemen strategi sebagai proses terdiri dari tiga tahap pokok yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian (evaluasi) strategi.

1. Perumusan Strategi

Tahap perumusan strategi perencana eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dapat menggunakan teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*).

2. Implementasi Strategi

Tahap implementasi pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek, kebijakan, motivasi dan pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategis, dan melembagakan strategi.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Tahap pengendalian dan evaluasi pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring itu, jika diperlukan maka semua strategi yang telah diterapkan dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu a) meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang, b) mengukur prestasi, dan c) mengambil tindakan korektif.

E. Konsep Visi dan Misi

Perumusan visi misi organisasi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakteristik rumusan visi misi tersebut. Visi merupakan sudut pandang ke masa depan organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan misi organisasi merupakan keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan, berupa kegiatan apa, yang sedang atau segera dilaksanakan untuk suatu organisasi. Visi sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan sekolah dikomunikasikan kepada *stakeholders*.

Misi merupakan tugas sekolah untuk mewujudkan visi lembaga yayasan dan sekolah, yang umumnya ditandai dengan kata mewujudkan. Perumusan visi dan misi sekolah berfungsi sebagai acuan dan mempermudah penetapan kebijakan sekolah, karena visi dan misi merupakan gambaran atau cita-cita ke depan sekolah. Visi dan misi sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan sekolah.

F. Manajemen Strategik sebagai Proses

Manajemen strategi sebagai proses terdiri dari tiga tahap pokok yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian (evaluasi) strategi.

1. Perumusan Strategi

Tahap perumusan strategi perencana eksekutif merumuskan visi misi organisasi, pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dapat menggunakan teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*).

2. Implementasi Strategi

Tahap implementasi pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek,

kebijakan, motivasi dan pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategis, dan melembagakan strategi.

3. Pengendalian dan Evaluasi

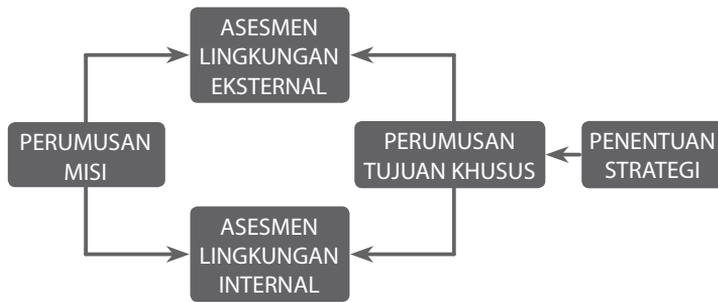
Tahap pengendalian dan evaluasi pimpinan melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring itu, jika diperlukan maka semua strategi yang telah diterapkan dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu a) meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang, b) mengukur prestasi, dan c) mengambil tindakan korektif.

Posisi formulasi dan implementasi dalam manajemen strategik terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1 Posisi Formulasi dan Implementasi dalam Manajemen Strategik

Selanjutnya proses formulasi strategik dapat ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar 2 mengilustrasikan proses keutuhan yang disederhanakan untuk memudahkan pemahaman. Terdapat lima langkah pokok formulasi strategi, yaitu 1) perumusan misi, 2) asesmen lingkungan eksternal, 3) asesmen organisasi, 4) perumusan tujuan khusus, dan 5) penentuan strategi.



Gambar 2 Proses Formulasi Strategik

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 disimpulkan bahwa analisis lingkungan terdiri dari dua unsur, yaitu analisis eksternal dan analisis internal (analisis organisasi). Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, teknologi, dan kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Kecenderungan ini merupakan sejumlah faktor yang sukar diramalkan (*unpredictable*) atau memiliki derajat ketidakpastian (*degree of uncertainly*) tinggi. Hasil dari analisis lingkungan eksternal adalah sejumlah peluang yang harus dimanfaatkan oleh organisasi (*opportunities*) dan ancaman yang harus dicegah (*threats*). Analisis lingkungan internal dari penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya dan berusaha untuk mengatasi kelemahannya. Analisis organisasi dapat membantu organisasi sekolah dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efektif. Analisis lingkungan eksternal dan internal ini lazim disebut analisis SWOT.

Analisis SWOT dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Strategi WO memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang. Strategi ST menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman. Strategi WT mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Secara lebih rinci terlihat pada Gambar 3.

	KEKUATAN (S)	KEKUATAN (W)
PELUANG (O)	SO	WO
ANCAMAN (T)	ST	WT

K E L E M E N A H A N	PELUANG		K E K U A T A N
	STRATEGI ORIENTASI MEMUTAR	STRATEGI AGRESIF	
	STRATEGI DEFENSIF	STRATEGI DIVERSIFIKASI	
	ANCAMAN		

Gambar 3 Matrik Analisis SWOT

G. Hierarki Strategi

Penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi nonprofit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan ke dalam tiga tingkatan, yakni:

1. Strategi korporasi atau level organisasi Depdiknas,
2. Strategi bisnis atau level Direktorat terkait di lingkungan diknas,
3. Strategi fungsional di jajaran bidang, seksi-seksi, dan sekolah-sekolah.

Secara sederhana hierarki tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.



Gambar 4 Hierarki Manajemen Strategik Pendidikan

Berdasarkan Gambar 4 disimpulkan ciri-ciri keputusan strategi pendidikan pada berbagai tingkatan tersebut dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Ciri-Ciri Keputusan Strategi Pendidikan

Ciri-ciri	Tingkat		
	Korporasi	Satuan Bisnis	Fungsional
Tipe	Konseptual	Campuran	Operasional
Takaran	Kualitatif	Semi kualitatif	Kualitatif
Frekuensi	Berkala/ sporadis	Berkala/ sporadis	Berkala
Adaptabilitas	Rendah	Sedang	Tinggi
Kaitan dengan kegiatan sekarang	Inovatif	Campuran	Tambahan
Risiko	Tinggi	Sedang	Rendah
Potensi keuntungan	Besar	Sedang	Kecil
Biaya	Besar	Sedang	Kecil
Kurun waktu	Jauh ke depan	Jangka sedang	Jangka pendek
Keluwesan	Tinggi	Sedang	Rendah
Interdependensi, interelasi, dan interaksi	Tinggi	Sedang	Rendah

Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam suatu organisasi (organisasi induk), membahas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya. Level korporasi seorang pemimpin organisasi mengoordinasi aktivitas tiap unit kerja yang terpisah secara struktural. Usaha mengembangkan dan mempertahankan kompetensi inti (*core competence*) pada tingkat korporasi cenderung lebih luas dan umum misalnya keuangan, sumber daya, dan efektivitas organisasi. Sinergi merupakan keunggulan kompetitif utama bagi lembaga pendidikan dimana kegiatan saling berkaitan dan memberikan kekuatan pada kegiatan lain dengan melakukan koordinasi dengan antar personalia.

Strategi tingkat bisnis memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Isu utama yang dikaji pada tingkat bisnis adalah cara mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan menganalisa kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Sekolah mengembangkan suatu bagian organisasi sekolah dapat berupa tim kerja yang menganalisa dan mengembangkan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga sekolah mengetahui aspek yang diinginkan layanan oleh masyarakat sebagai pedoman dan bahan pertimbangan sekolah untuk menerapkan rencana strategis.

Strategi tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari strategi bisnis. Strategi fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional seperti strategi keuangan sekolah. Kepala sekolah mendelegasikan pengembangan strategi fungsional kepada para wakil kepala sekolah, seperti kegiatan promosi sekolah. Sekolah menganalisa keunggulan sekolah yang nantinya dikembangkan menjadi pedoman dalam arah kebijakan sekolah.



A cartoon illustration of a young man with glasses sitting on a stack of books, reading a book. There are several other books and papers scattered around him. The background is a brick wall.

BAB III

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN

A. Dasar Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional

Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 menjadi PP Nomor 32 Tahun 2013 merupakan upaya penyempurnaan Standar Nasional pendidikan (SNP) dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu:

1. Demographic dividant (perkembangan/bonus demografi)
2. Global competitiveness (persaingan global)
3. Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis sumber dayaalam ke pembangunan berbasis peradaban.⁵⁶

B. Definisi dan Komponen Standar Nasional Pendidikan

Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk,

⁵⁶ Yuliana Rita dan Tuti Rahma, "Perbandingan PP Nomor 19 Tahun 2005 dengan PP Nomor 23 Tahun 2013", https://www.academia.edu/5404030/Perbandingan_PP-19-2005_dan_PP-32-2013, diakses pada 16 Juni 2018.

atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.⁵⁷ Wiley dalam bukunya *The Leader's Guide to Standar* menyatakan bahwa:

1. Standar adalah aturan main, Dengan demikian standar itu bukan sesuatu yang baru, melainkan telah melekat dalam kehidupan.
2. Standar itu sedang-sedang saja (mediocrity), menerapkan standar berarti bukan menetapkan kriteria yang paling unggul.
3. Standar itu konsistensi, jika anda gunakan standar berarti anda menetapkan harapan.
4. Standar itu nilai tambah, jika anda menerapkan standar maka harus fokus pada prioritas.
5. Standar itu kejujuran kepada publik. Menerapkan standar berarti melaksanakan tugas dengan mendeskripsikan harapan dengan tepat dan memenuhi harapan sebagai penunaian kewajiban.
6. Standar itu efektivitas, memenuhi standar artinya menehi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam tujuan.⁵⁸

Sedangkan Standar menurut W.J. S. Poerwadarminta adalah "ukuran atau sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran".⁵⁹

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Tilaar standarisasi merupakan "suatu pengejawatan dari pahan *all can be measured* segala sesuatu dapat diukur, karena sesuatu dapat diukur maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu benda ataupun suatu servis.⁶⁰

Secara umum ada tiga alasan perlunya sebuah standarisasi bagi dunia pendidikan yaitu:

⁵⁷ Nukleus Smart, "Konsep Dasar Penerapan Standar Sistem Pendidikan", file:///http/konsep-dasar-penerapan-standar-sistem.html, diunduh pada tanggal 16 Juni 2018.

⁵⁸ Nukleus Smart, "Konsep Dasar Penerapan..."

⁵⁹ Syamsul Hadi Rukkiyah. Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah Nasional Berstandar Internasional. file:///http/standar-nasional-pendidikan-dan-sekolah.html/, diunduh pada tanggal 16 Juni 2018.

⁶⁰ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 47.



- a. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kita memerlukan ukuran untuk menilai sejauh mana warga negara Indonesia itu mempunyai misi yang sama, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat mengembangkan negara kesatuan tersebut.
- b. Standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi. Di dalam kehidupan global terjadi persaingan yang semakin lama semakin tajam, oleh sebab itu setiap warganegara perlu mengangkat dirinya sendiri di dalam kehidupan yang penuh persaingan. Kehidupan yang penuh persaingan bukan berarti kehidupan yang penuh permusuhan tetapi terus menerus memperbaiki diri dengan meningkatkan kemampuan diri agar supaya tidak menjadi budak dari bangsa-bangsa lain.
- c. Standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan (progress). Setiap negara tidak menginginkan negaranya tertinggal dari bangsa-bangsa lain dan menginginkan menjadi sebuah negara maju. Untuk menjadi negara maju tentunya diperlukan kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang bukan hanya menjadi konsumen dari produk-produk negara maju lainnya tetapi juga dapat berpartisipasi di dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia.⁶¹

Ada enam alasan juga standar dijadikan kebutuhan yang diperlukan dalam dunia pendidikan di Indonesia yaitu:

- a. Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu pula tidak mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuai yang diinginkan oleh masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana pendidikan nasional maupun daerah.
- b. Sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional. Sebagai suatu sistem tentunya diperlukan

⁶¹ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis...*

suatu patokan atau ukuran sampai dimana sistem tersebut berhasil atau tidak.

- c. Anggota masyarakat global. Sebagai anggota masyarakat global, negara Indonesia berada di dalam pergaulan antar bangsa. Kualitas pendidikan merupakan indikator mutlak di dalam persaingan internasional.
- d. Melihat dari fungsi standar nasional pendidikan itu sendiri. Standar nasional pendidikan berfungsi untuk pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut tentunya bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan.
- e. Fungsi standar nasional pendidikan adalah penyusunan strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi belajar secara nasional seperti ujian nasional.⁶²

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³ Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan ini ialah sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Sedangkan tujuan utama dari Standar Nasional Pendidikan ialah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar nasional pendidikan merupakan kumpulan komponen yang dijadikan kriteria serta acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005, pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan

⁶² H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis...*, hlm. 48-49.

⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional.



penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan :

- a. Pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik
- b. Proses pembelajarn yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis
- c. Hasil pendidikan yang bermutu dan terukur
- d. Berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal
- f. Berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan.
- g. Terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.⁶⁴

Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan.⁶⁵

⁶⁴ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis...*, hlm. 50.

⁶⁵ PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4) tentang Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa “Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan, keterampilan”. Secara garis besar standar kompetensi lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kekelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.
3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan,

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.

4. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
 5. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
 6. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing- masing perguruan tinggi.⁶⁶
2. Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut PP No.32 Tahun 2013, pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan standar isi adalah "ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu". Yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus

⁶⁶ PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013...

pelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Menurut UU No.20 Tahun 2003 "kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan".

Setiap kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mempengaruhi pemahaman dan penghayatan peserta didik, dan semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan.

Kurikulum dan silabus dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca serta menulis, kecakapan berhitung, dan kecakapan berkomunikasi.

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan.



2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan jasmani.
 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 4. Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
 5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan dilaksanakan melalui muatan dan kegiatan jasmani, olah raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.
- b. Beban belajar

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan beban belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar untuk pendidikan dasar dan menengah menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
2. Pendidikan yang berbasis agama dapat menambah beban belajar untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
3. Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif dan tatap muka, dan presentase beban belajar ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

4. Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS) ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
 5. Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktik keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan, yang secara efektif Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.
 6. Kurikulum untuk SMP dan SMA, serta bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup (kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional), serta pendidikan berbasis keunggulan lokal.
 7. Pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
 8. Beban SKS minimal dan maksimal bagi program pendidikan tinggi ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP, sedangkan beban SKS efektif diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun BSNP.
2. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.



3. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing- masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

d. Kalender Pendidikan/Akademik

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kalender pendidikan/akademik adalah sebagai berikut:

1. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu belajar efektif, dan hari libur.
 2. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester selamalamanya satu minggu, dan jeda antar semester.
 3. Kalender pendidikan/kalender akademik untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
3. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Menurut PP No. 23 Tahun 2013, pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan standar proses adalah “standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan”. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BNSP, dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perlengkapan fisik serta psikologis peserta didik.
- b. Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.
- c. Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- d. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- e. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal perpendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik.
- f. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- g. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan



penugasan perorangan atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- h. Untuk mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.
- i. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Menurut PP No.23 Tahun 2013, pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah "kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan". Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - 1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
 - 2) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
 - 3) Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

- 4) Kompetensi sosial Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Di samping itu, yang paling penting mereka juga harus memiliki kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara proporsional.

- a. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetap memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan uji kesetaraan.
- b. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
- c. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
 - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1),
 - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- d. Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
 - 2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- e. Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1),

- 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- f. Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
 - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- g. Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
 - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk SDLB, SMPLB, DAN SMALB.
- h. Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat memiliki
- 1) Kualifikasi pendidikan minimum diplola empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
 - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan
 - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK
- i. Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum :



- 1) Lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) untuk program diploma.
- 2) Lulusan program magister (S-2) untuk program sarjana (S-1)
- 3) Lulusan program doktor (S-3) untuk program magister (S-2) dan program doktor (S-3)

Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan juga dikemukakan berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain dikemukakan bahwa untuk kepala sekolah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing tempat dia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan oleh peraturan menteri, yang secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai guru;
 - 2) Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

8. Standar Penilaian Pendidikan

- a. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
- b. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- c. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- d. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- e. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:



- f. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
- g. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- h. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

C. Implementasi SNP di Wilayah Perbatasan

Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat terbatas. Di masa lalu kawasan perbatasan dipandang sebagai wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya, di sejumlah daerah, kawasan perbatasan tidak tersentuh dinamika pembangunan terutama di bidang pendidikan. Masyarakat di kawasan itu pun umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Di lain pihak, negara tetangga seperti Malaysia justru telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan.⁶⁷

Sejak tahun 1999, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) amanatkan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan

⁶⁷ Iskandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Wilayah Perbatasan", Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2, Desember 2012, hlm. 174-175.

pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Di samping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.⁶⁸

Dalam Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih selektif dan optimal. Sejauh ini pengelolaan perbatasan antarnegara masih bersifat sementara (ad hoc) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah: 1) General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI; 2) Join Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri; 3) Join Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri; dan 4) Join Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral. Atas dasar itu dalam penanganan masalah perbatasan diperlukan adanya program yang terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dengan memperhatikan segenap aspek yang mempengaruhi seperti kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, keamanan, konservasi sumber daya alam, dan sumberdaya manusia.⁶⁹

⁶⁸ Iskandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Wilayah Perbatasan..."

⁶⁹ Iskandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Wilayah Perbatasan..."

Dalam pergeseran pendekatan dari keamanan ke kesejahteraan, jelas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumberdaya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan ini pendidikan memiliki peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan, sekaligus wahana untuk membentuk karakter dan sikap kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi.

Dengan melihat kondisi real ini maka dibutuhkan skala prioritas dalam mengimplementasikan standar nasional pendidikan khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Menurut hemat penulis ada 2 Komponen penting yang harus menjadi skala prioritas dalam pengembangan standar nasional pendidikan di wilayah perbatasan yaitu standar sarana prasarana dan standar tenaga pendidik dan kependidikan.

1. Standar Sarana dan prasarana

Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007, pasal (1) dikatakan bahwa Standar Sarana/Prasarana untuk sekolah/madrasah mencakup kriteria minimum dan sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini berarti bahwa setiap sekolah/madrasah paling tidak diharuskan dapat memenuhi kriteria minimum baik sarana maupun prasarana. Bagi sekolah-sekolah yang dukungan finansialnya memadai hal ini tentu tidak menjadi hambatan, tetapi bagi sekolah yang dukungan finansialnya kurang memadai, untuk dapat memenuhi standar minimal sarana/prasarana sesuai harapan tentu butuh kesabaran, kreativitas, pendekatan dan kerja keras dari semua komponen. Ketika standar minimal sarana/prasarana saja belum terpenuhi, tentu kita sulit untuk berbicara peningkatan mutu, karena peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem.

Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan tentu tidak hanya bisa kita batasi dalam bentuk diskusi analisis kebutuhan internal sebuah lembaga pendidikan akan tetapi harus dikaitkan pula pada kondisi eksternal lembaga pendidikan yang berada di wilayah perbatasan tersebut. Ketika berbicara tentang pengembangan sarana prasarana di internal lembaga pendidikan maka kita telah memiliki standar yang telah ditetapkan oleh badan standar nasional pendidikan akan tetapi ketika berbicara tentang infrastruktur pendukung yang dapat mempermudah akses menuju lembaga pendidikan tersebut maka beberapa pihak tentunya harus turut berkontribusi dalam memikirkan serta mendesain kebijakan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Sebagaimana kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa untuk wilayah wilayah perbatasan di Indonesia kondisi infrastruktur sangat memprihatinkan semisal wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dapat kita lihat bahwa kondisi infrastruktur yang dimiliki Malaysia jauh lebih baik dibandingkan infrastruktur yang dimiliki oleh wilayah perbatasan Indonesia di antaranya kondisi jalan yang belum tertata dengan baik sehingga akses untuk menempuh perjalanan sangat susah belum lagi listrik yang tidak memadai serta ketidak Tersedianya air bersih termasuk pula bangunan sekolah sekolah yang terkesan apa adanya dan belum mendapat support maksimal dari pemerintah maka yang muncul kemudian adalah kualitas pendidikan yang sangat memprihatinkan yang jauh dari harapan dari tujuan pendidikan nasional. Ada kecenderungan dari masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di negeri tetangga karena Jaminan kenyamanan serta fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh negara tetangga tentu jika kondisi ini dibiarkan maka akan mengikis rasa nasionalisme dari masyarakat wilayah perbatasan karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia.



Belum lagi jika kita melihat kondisi riil anak-anak TKI yang sebagian besarnya terlantar dikarenakan oleh orang tua mereka yang bekerja di di negara tetangga yang akhirnya nya melepaskan hak-hak mereka untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak kondisi ini Tentunya menjadi sebuah keprihatinan akan niat pemerintah untuk menyelenggarakan pemerataan pendidikan di semua wilayah negara Indonesia. Menyikapi kondisi ini Tentunya beberapa Kementerian harus dapat duduk bareng untuk mendiskusikan serta merumuskan prioritas penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan semisal dengan melibatkan Kementerian perencanaan pembangunan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama dan beberapa Kementerian lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menangani kebutuhan pendidikan wilayah perbatasan.

2. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menindaklanjuti analisis kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya di wilayah perbatasan seyogianya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Mengingat ketersediaan 2 komponen standar ini sangatlah minim guna memenuhi rasio ideal jumlah pendidik dan tenaga kependidikan profesional. Kondisi ini menurut hemat penulis terbangunnya mindset bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki banyak keterbatasan fasilitas terutama akses. Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penambahan tunjangan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang ditempatkan di wilayah perbatasan namun dalam realitasnya belum menampakan hasil yang memuaskan karena masih banyak ditemui mereka yang ditempatkan di wilayah wilayah perbatasan tidak dapat aktif secara maksimal untuk menjalankan tugasnya Selain itu mereka yang sudah ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut tetap berupaya ya untuk meminta mutasi ketika peluang tersebut mereka dapatkan. oleh karenanya dalam hal ini khususnya pemerintah daerah harus dapat mendesain sebuah kebijakan yang bisa memberikan jaminan kelayakan

atau kesejahteraan serta membangun komitmen kerja mereka dengan adanya kebijakan tersebut.

Keberadaan tenaga pendidik dan kependidikan atau dapat kita katakan sebagai pemenuhan sumber daya manusia di bidang pendidikan menjadi sebuah keniscayaan untuk wilayah perbatasan karena jika SDM profesional tersebut dapat terpenuhi maka secara perlahan kualitas pendidikan di wilayah tersebut tentunya akan meningkat secara perlahan-lahan. Kita bisa berkaca dengan negara tetangga kita khususnya di wilayah perbatasan jika kita amati bahwa infrastruktur sarana prasarana serta SDM yang dikelola di wilayah tersebut dilakukan secara maksimal dan dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi tenaga pendidik dan kependidikan mereka. Sehingga secara otomatis penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan mereka bisa berjalan dengan baik dan dapat bersaing dengan penyelenggaraan pendidikan di kota. Selain itu keberadaan tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah perbatasan Sesuai dengan standar nasional pendidikan tentunya dapat memberikan pengaruh positif yang cukup banyak diantaranya menumbuhkembangkan rasa nasionalis atau kebanggaan terhadap negara Indonesia sebagai sebuah identitas yang harus tertanam di dalam lubuk sanubari para siswa.

Infrastruktur dan SDM yang sangat terbatas sedikit banyak akan memunculkan rasa pesimistis dari masyarakat wilayah perbatasan karena lahirnya rasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat dan ini tentunya akan berimbas pada lunturnya nya sikap bangga terhadap negara mereka sendiri dan cenderung lebih memuja Negara tetangga yang sedikit banyak telah memberikan fasilitas kepada mereka.





BAB IV

SEKOLAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA

A. Kondisi Pendidikan Perbatasan

Pendidikan merupakan aspek utama dalam suatu negara yang berguna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi zaman yang semakin maju dan berkembang. Di Indonesia sistem pendidikan yang ada sudah cukup maju, namun tidak diimbangi pemerataan mutu pendidikan di setiap daerah. Oleh karena itu terjadi suatu kesenjangan antara pendidikan di daerah satu dengan daerah lainnya. Contohnya pendidikan di daerah perkotaan dinilai lebih maju dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai daripada pendidikan di daerah perbatasan yang mutu pendidikannya masih rendah dan masih minim fasilitas yang tersedia. Daerah perbatasan merupakan teras atau halaman depan suatu negara karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Seperti negara Indonesia berbatasan darat dengan Negara Malaysia, Timor Leste dan lainnya. Sebagai teras negara seharusnya dapat memberi gambaran baik tentang bagaimana negara tersebut ada.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Namun Indonesia belum mampu mencapai tujuan Undang-Undang tersebut karena masih kurangnya pemerataan pendidikan. Pemerintah sudah mengupayakan program wajib belajar 9 tahun dengan biaya sekolah gratis, namun kenyatannya hanya di daerah-daerah tertentu yang melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu banyak anak perbatasan yang memilih sekolah di negara tetangga dengan alasan biaya gratis dan fasilitas memadai.

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), “Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.”

Berdasarkan survei PERC dalam diatas, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus membenahi sistem pendidikan agar lebih berkualitas, guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi-potensi baru untuk membangun negara agar lebih maju. Namun pendidikan di Indonesia belum ada pemerataan. Banyak ketimpangan terjadi, pendidikan di kota-kota besar lebih berkualitas, baik pembelajaran maupun fasilitasnya. Keadaan ini berbalik dengan pendidikan di daerah perbatasan yang sangat memprihatinkan. Seperti di Pulau NTT, NTB, Maluku, Papua, dan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Di pulau-pulau tersebut kondisi dan kualitas pendidikan masih sangat minim. Seperti akses untuk mencapai ke sekolah mengharuskan para siswa berjalan lebih kurang 1-2 jam dengan jarak sampai 5-6 kilometer. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di negeri tetangga dengan alasan lebih dekat jarak tempuhnya.



B. Profil Sekolah Provinsi Kalimantan Utara

1. Sekolah Tapal Batas Sebatik

Sekolah Tapal Batas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqan yang beralamat di Jalan Asnur Daeng Pasau RT. 12 Dusun Kampung Barru, Desa Sungai Limau Kecamatan Sebatik Tengah, Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah ini fokus pada pemberantasan buta aksara, memberikan pendidikan bagi anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan pendidikan pemberdayaan usaha mandiri bagi masyarakat Sebatik. Sekolah Tapal Batas menerapkan tiga program pembelajaran yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Sekolah ini juga memiliki Paket A dan Paket B untuk memberantas buta aksara di Pulau Sebatik. Sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 yang dikolaborasi dengan kurikulum dari Kementerian Agama. Pulau Sebatik yang wilayahnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian utara milik kerajaan Malaysia sedangkan pada bagian selatan milik Republik Indonesia. Ironinya, wilayah Sebatik Malaysia banyak dihuni oleh warga Indonesia dengan menjadi TKI. Namun, para anak TKI ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan di wilayah Malaysia sehingga dengan rasa kepeduliannya Hj. Suraidah mendirikan Sekolah Tapal Batas dengan meminjam sebuah rumah warga yang ada di daerah perbatasan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Sekolah Tapal Batas Hj. Suraidah, S. KM., MNSc mengatakan bahwa untuk mendirikan Sekolah Tapal Batas bukanlah hal yang mudah. Hj. Suraidah selalu masuk ke daerah perkebunan Malaysia bertemu dengan para TKI untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan meyakinkan para TKI untuk menyekolahkan anaknya.

“Membuat sekolah ini bukan hal yang mudah, kita harus masuk ke daerah perkebunan untuk menyakin para orang tua siswa agar mau menyekolahkan anaknya. Untuk masuk ke daerah perkebunan Malaysia kita harus berurusan dulu dengan polisi perbatasan Malaysia”, Ujarnya lulusan magister dari Thailand.

Menurut siswa Sekolah Tapal Batas, untuk menuju sekolah ini butuh perjuangan ekstra, mereka harus berurusan dengan polisi penjaga perbatasan Malaysia-Indonesia karena setiap hari para siswa ini berjalan lintas negara Indonesia–Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Bahkan, para siswa harus berangkat ke sekolah jam 5 pagi karena jarak tempuh ke sekolah yang begitu jauh ditambah dengan infrastruktur jalan di Pulau Sebatik yang tidak mendukung. “Kita harus berangkat kesekolah jam 5 pagi. Biasanya kita dikejar polisi perbatasan Malaysia. Yang paling parah itu jalan menunggu ke sekolah yang kurang bagus”, Ujarnya siswa Tapal Batas.Rabu (3/8). Pulau Sebatik sering digunakan sebagai jalur keluar masuk TKI dan menjadi tempat para anak TKI mendapatkan akses pendidikan. Meskipun berada di daerah perbatasan, prestasi sekolah ini tak terbatas. Para siswa ini bisa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahkan, sekolah ini pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan bergensi dari film dokumenter Eagle Award di salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia.

2. SMKN 1 Sebatik

SMKN 1 Sebatik beralamatkan di Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Utara.

1. Data PTK dan PD					
No	Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
1	Laki - Laki	11	1	12	195
2	Perempuan	19	0	19	190
TOTAL		30	1	31	385

Keterangan:

- Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
 1. PTK = Guru ditambah Tendik
 2. PD = Peserta Didik

2. Data Sarpras		
No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kelas	16
2	Ruang Lab	2
3	Ruang Perpus	1
TOTAL		19

3. Data Rombongan Belajar				
No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 10	L	80	158
		P	78	
2	Kelas 11	L	63	129
		P	66	
3	Kelas 12	L	52	98
		P	46	

3. SMKN 1 Nunukan

SMK Negeri 1 Nunukan merupakan sekolah kejuruan negeri satu-satunya yang terdapat di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan merupakan sekolah kejuruan pertama yang didirikan di Kabupaten Nunukan. Sekolah ini beralamatkan di Jl. Sei. Fatimah RT. 20 Nunukan Barat, Nunukan.

SMK Negeri 1 Nunukan didirikan pada tanggal 24 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah oleh Bupati Nunukan No. 0583 / NK-VII / 2003.

SMK Negeri 1 Nunukan mulai menerima siswa baru pada tahun pelajaran 2003/2004, dengan program keahlian pada saat itu adalah : Akutansi, Budidaya tanaman dan Budidaya ikan. Pada tahun ajaran 2009/2010, SMK Negeri 1 Nunukan menambah satu program studi baru yaitu Multimedia. Dan pada tahun ajaran 2010/2011, kembali membuka satu program studi baru lagi yaitu Administrasi Perkantoran. Hingga kini,

SMK Negeri 1 Nunukan telah memiliki 5 Program Studi yaitu Pertanian, Perikanan, Akuntansi, Multimedia dan Administrasi Perkantoran.

Sejak awal berdirinya, SMK Negeri 1 Nunukan telah beberapa kali melakukan pergantian Kepala Sekolah. Adapun Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMK Negeri 1 Nunukan adalah :

1. Hj. Hanni (Tahun 2003 – ...)
2. Drs. Ahmad (Tahun ... – 2012)
3. La Sali, S.Pd (Tahun 2012 – 2018)

VISI :

“Mewujudkan SMK Negeri 1 Nunukan Unggul Dalam Prestasi, Berbasis Dunia Kerja, Kompeten dan Berwawasan Lingkungan Serta Mampu Bersaing Pada Tingkat Nasional dan Global”.

MISI :

1. Menumbuhkan Semangat Keunggulan dan Kompetitif Serta Berwawasan Lingkungan Kepada Seluruh Warga Sekolah.
2. Melaksanakan Kurikulum Melalui Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Kompetensi, Cinta Lingkungan dan Budaya Hidup Bersih.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Guru Yang Berwawasan Lingkungan Hidup.
4. Mengembangkan Potensi Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler yang Berwawasan Lingkungan Hidup Dan Penilaian Kedisiplinan yang Berorientasi Pada Pola Hidup Bersih.
5. Menerapkan Layanan Prima Dalam Pengelolaan Sekolah Melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dan Sistem Penanganan Sampah yang Baik Untuk Menghasilkan Sekolah Yang Bersih, Sehat, dan Berwawasan Lingkungan Hidup.
6. Mengembangkan Jejaring Kerja Lintas Sektoral Dunia Kerja Dunia Usaha Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.



TUJUAN :

1. Meningkatkan kompetensi Guru dan Peserta Didik sebagai sumber daya profesional masa depan;
2. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil dan mandiri serta produktif;
3. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, mampu ber-kompetensi dan mampu mengembangkan diri dalam era globalisasi;
4. Menyempurnakan fasilitas pendidikan dan pengajaran serta mewujudkan suasana belajar mengajar yang kondusif;
5. Memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan dunia usaha, industri dan alumni.

C. Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah

Perbatasan KALTARA

Penelitian ini di laksanakan dengan mengambil 3 lokus, yakni Sekolah Tapal Batas Indonesia-Malaysia Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Furqan, SMKN 1 Sebatik dan SMKN 1 Nunukan. Hal ini didasari pertimbangan dari Dinas Pendidikan Kalimantan Utara yang merekomendasikan ke tiga sekolah tersebut yang memiliki siswa dari para pekerja sawit (baca: TKI).

Kondisi perbatasan yang cukup memperehatinkan ini, tentunya membutuhkan perhatian serius dalam mengembangkan model-model pendidikan berbasis kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh, karenanya dibutuhkan strategi dan pemikiran kreatif-inovatif bagi setiap sekolah yang berada di wilayah tersebut. Berkaitan dengan penelitian penulis, argument ini menjadi dasar pijakan penggalan data di lapangan, khususnya pada sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai sampling penelitian. Berikut akan penulis paparkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis temukan di lapangan:

1. Analisis potensi dan profil satuan pendidikan (sekolah/madrasah) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan;

2. Analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan;
3. Menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan;
4. Menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah
5. Strategi Memunculkan Keunikan Sekolah

Berdasarkan lima komponen di atas maka akan diperoleh gambaran data sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Sekolah

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh wadah atau tempat guna proses suatu perubahan berencana yang memerlukan dukungan semua pihak, antara lain Kepala sekolah, guru, dan siswa dengan perubahan-perubahan itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan, yang memerlukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang. Termasuk dalam penelitian ini, yakni strategi pengembangan pendidikan di perbatasan, maka dibutuhkan pula upaya-upaya dalam pengembangan lembaga pendidikannya. Berdasarkan kutipan wawancara yang penulis lakukan, dapat dipaparkan sebagai berikut:

"Sekolah selama ini telah berupaya untuk dapat merekrut para calon siswa yang berasal dari daerah perbatasan. Maksudnya adalah bahwa yang sebagian besar dari calon siswa tersebut berasal dari anak yang orang tuanya bekerja dengan cukong-cukong di perkebunan Malaysia. Yang menjadi pemikiran mendasar kami selama ini, bahwa anak-anak usia sekolah yang berada di camp-camp tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan cenderung diabaikan oleh orang tua mereka. Belum lagi kondisi akhlak anak yang bisa dikatakan mendapatkan pengaruh buruk karena lingkungannya yang buruk, dan terutama pengetahuan agama Islam mereka yang sangat



memprihatinkan. Hal ini disebabkan orang tuanya yang juga sudah tidak memperhatikan bahkan tidak paham tentang aturan agama (syari'at Islam). Di lingkungan camp bahkan sudah kerap dijumpai anak-anak sudah mulai mengenal judi, ngellem dan juga perilaku kasar yang sering terjadi diakibatkan orang tua mereka yang kerap bertindak kasar. Tetapi masalah yang paling mendasar adalah bahwa rendahnya pengetahuan agama anak karena orang tua yang juga memiliki pengetahuan minim serta kurang peduli dengan hukum agama. Dari pantauan kami, bahkan ada yang menikah beda agama. Oleh karena itu, hadirnya sekolah tapal batas ini kami harapkan dapat memberikan hak-hak pendidikan bagi anak-anak TKI usia sekolah dari tingkatan PAUD sampai MI dengan harapan akhlak mereka dapat terbina dan mereka mengenal aturan agama Islam. Selama ini strategi yang kami lakukan adalah mencoba mengajak anak-anak TKI untuk mau bersekolah di sekolahan kami dengan cara mendatangi camp-camp yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Memang awalnya banyak orang tua yang menolak karena susahnya proses administrasi keluar-masuk di pos-pos penjagaan perbatasan. Tetapi kami terus meyakinkan secara persuasif bahwa pendidikan, khususnya pendidikan agama sangat penting bagi masa depan anak. Yang kedua kami memberuikan sekolah gratis tanpa memungut biaya sepeserpun, bahkan guru-guru yang mengajarpun tidak digaji, semata-mata lillahi ta'ala. Selanjutnya kami juga telah berupaya untuk membangunkan asrama-asrama bagi siswa yang ingin tinggal di lingkungan sekolah, cuman yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana serta fasilitas yang ada. Akan tetapi beberapa warga juga sudah ada yang menunjukkan kepedulian untuk memberikan sumbangan, dan dalam waktu dekat ini telah dibuat cikal-bakal kolam ikan untuk pemenuhan kebutuhan santri di tempat kami”.

2. Strategi Sekolah dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk keberlangsungan sekolah tapal batas ini adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan-perusahaan

swasta, hingga yang bersifat personal. Keberadaan sekolah tapal batas ini bisa tetap ada dan eksis dikarenakan peran masyarakat dalam hal ini mitra sekolah. Beberapa sarana dan prasarana dapat terbangun berkat bantuan dari berbagai pihak. Di antara pihak-pihak yang menjadi mitra kami antara lain: Perusahaan Pertamina, Yayasan Yusuf Kalla (bahkan beberapa waktu yang lalu, kami sempat diundang dan hadir di Jakarta), Pesantren Darul Qur'an (Daqu) Yayasan KH. Yusuf Mansyur yang mengirim ustadnya untuk membantu proses pembelajaran di sekolah ini. Ada juga beberapa LSM yang turut memberikan dukungan dan mencoba mencari mitra untuk keberlangsungan sekolah ini. Selain itu keberadaan TNI diperbatasan juga turut membantu kegiatan pembelajaran di sekolah seperti memberikan pelatihan baris-berbaris dan upara bendera. Beberapa perguruan tinggi pun pernah terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di perbatasan seperti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UNMUL Samarinda."

Dalam membangun kemitraan, setidaknya ada 4 strategi yang dapat diterapkan merujuk pada hasil temuan penelitian S. Alil Jadid al Idrus, yaitu akuntabilitas, relevansi, kualitas dan otonomi kelembagaan. Akuntabilitas yaitu bagaimana sekolah dapat membaca dan memotret kebutuhan masyarakat serta pelibatan mereka dalam akan pendidikan. Relevansi yaitu, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentukan siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kualitas yaitu sekolah dapat menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang dapat merubah anak didik menjadi lebih baik, dalam konteks pendidikan perbatasan pemberdayaan anak dengan ragam keilmuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Otonomi kelembagaan yaitu sekolah menjadi dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam penelitian ini, bahwa Ibu Juraidah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan sekolah tapal batas bagi anak-anak TKI

di perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa telah dilakukan proses identifikasi sebagai kegelisahan awal akan krisis pengetahuan agama yang dimiliki oleh anak-anak TKI perbatasan serta rendahnya rasa nasionalisme yang dimiliki. Selanjutnya didirikan sekolah tapal batas, sebagai *follow up* dari impian serta perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan sekolah menjadi salah satu pelopor kepedulian pendidikan bagi anak-anak di wilayah perbatasan dengan segala keterbatasannya.

3. Pola Pendidikan yang Diterapkan di Wilayah Perbatasan

Di sekolah tapal batas yang memiliki background madrasah merupakan sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah yaitu Kemenag. Selain itu ada juga pendidikan pesantrennya yang dilaksanakan di luar jam formal. Untuk kegiatan pesantren ini didukung oleh Ustadz yang dikirim oleh KH. Yusuf Mansyur untuk memberikan pembinaan keagamaan. Selain itu, untuk menopang pengetahuan agama Islam siswa, kami juga memberikan kegiatan eks-school yaitu Pembinaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Wawasan Kebangsaan (PKn) untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, Pramuka dan latihan baris-berbaris yang dibina oleh bapak-bapak TNI.

Berdasarkan temuan penulis, di sekolah tersebut memiliki *background* madrasah yang merupakan sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah yaitu Kemenag. Selain itu ada juga pendidikan pesantrennya yang dilaksanakan di luar jam formal. Untuk kegiatan pesantren ini didukung oleh Ustadz yang dikirim oleh KH. Yusuf Mansyur untuk memberikan pembinaan keagamaan. Selain itu, untuk menopang pengetahuan agama Islam siswa, kami juga memberikan kegiatan *ex-school* yaitu Pembinaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Wawasan Kebangsaan (PKn) untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, Pramuka dan latihan baris-berbaris yang dibina oleh bapak-bapak TNI. Yang menarik menurut penulis adalah, bahwa sekolah ini mencoba meramu model *Boarding School* dengan berbagai

keterbatasannya. Bahkan dari hasil observasi, terdapat asrama bagi siswa dan untuk siswa putri langsung di bawah pengawan kepala sekolah yakni Ibu Juraidah.

4. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam Mengembangkan Sekolah Pihak pengelola memang menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang kami miliki. Berhubung sekolah ini berlokasi jauh diperbatasan, bahkan akses untuk ke sini saja terbilang jauh, tentunya banyak sekali kekurangan yang dimiliki. Walaupun demikian, kami tetap optimis dan bersemangat karena ini kami lakukan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah untuk mendidika anak bangsa, karena masih sedikit orang mau peduli dengan kondisi anak-anak TKI di perbatasan Malaysia-Indonesia.

Berdasarkan observasi penulis memang banyak sekali kekurangan pada sekolah tersebut. Berhubung sekolah ini berlokasi jauh diperbatasan, bahkan akses untuk ke sini saja terbilang jauh, tentunya banyak sekali kekurangan yang dimiliki. Walaupun demikian, kami tetap optimis dan bersemangat karena ini kami lakukan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah untuk mendidik anak bangsa, karena masih sedikit orang mau peduli dengan kondisi anak-anak TKI di perbatasan Malaysia-Indonesia. Selain itu keterbatasan sarpras, walaupun sudah ada beberapa sumbangan yang turut melengkapinya, tetapi jika merujuk pada standar pendidikan nasional masih dikatakan kurang memenuhi syarat. Selain itu, faktor kesadaran orang tua yang masih minim karena mereka lebih mementingkan untuk dapat menghasilkan uang dengan bekerja ketimbang menyekolahkan anaknya sebagai investasi jangka panjang. Hal ini senada dengan hasil temuan penelitian Aylin A'ing yang menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi kendala dalam manajemen pendidikan di sekolah perbatasan Malinau, yakni kesadaran orang tua, sarpras dan letak sekolah yang jauh.

Sedangkan menurut Iskandar Agung, bahwa penting untuk menyisipkan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menanamkan cinta tanah air,

karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ada kecenderungan anak-anak Indonesia untuk bersekolah di Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan.⁷⁰ Sedangkan dalam penelitian penulis juga menemukan bahwa sekolah di wilayah Indonesia merupakan pilihan alternative setelah mereka tidak diterima di sekolah-sekolah Malaysia.

Jika dalam menurut Lia Rosliana dkk., ada berbagai isu penting di perbatasan, antara lain: isu batas negara pertahanan dan keamanan daerah perbatasan, isu kelembagaan, isu perekonomian masyarakat, isu pendidikan, isu infrastruktur, isu potensi daerah, maka dalam temuan penulis dapat digambarkan beberapa isu yang juga mencuat yaitu, isu religiusitas (baca: penanaman nilai-nilai Islam) yakni krisis pengetahuan agama anak serta moralitas mereka. Pengetahuan agama ini jika dilihat dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut penulis, akan berpengaruh terhadap pola ibadah mereka baik ibadah secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal implementasi ajaran agama mereka kepada Allah SWT terbilang rendah karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki baik untuk masalah fikihnya maupun tauhidnya. Minimnya pengetahuan ini akan berimplikasi pada kesadaran untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten. Secara horizontal, ibadah sosial anak-anak juga tergambar dalam prilakunya, disebabkan minimnya pengetahuan agama bertalian dengan masalah akhlakul karimah. Hal ini dapat dilihat, dengan cara berbicara serta prilaku mereka yang terbilang kurang sopan (baca: kasar).

Secara holistik pembahasan hasil temuan penulis dapat digambarkan pada table berikut:

⁷⁰ Sikandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan", Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2, Desember 2012, hlm. 173-184.

NO.	ASPEK YANG DIGALI	DESKRIPSI TEMUAN
1.	Strategi sekolah dalam melakukan pengembangan	Strategi yang dikembangkan yaitu <i>boarding school</i> . Model penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut telah memadukan dua kategori yakni sekolah formal dengan asrama. Menurut penulis, strategi ini cukup relevan mengingat bahwa, jarak tempuh anak-anak yang bersekolah terbilang jauh dengan medan yang cukup berbahaya melintasi perbatasan tanpa permit. Hadirnya <i>boarding school</i> ini tentu akan lebih meringankan beban anak dan juga dapat lebih mengintensifkan proses belajar dan pembinaan di luar jam formal.
2.	Strategi membangun kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas yaitu bagaimana sekolah dapat membaca dan memotret kebutuhan masyarakat serta pelibatan mereka dalam akan pendidikan. 2. Relevansi yaitu, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentuk siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 3. Kualitas yaitu sekolah dapat menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang dapat merubah anak didik menjadi lebih baik, dalam konteks pendidikan perbatasan pemberdayaan anak dengan ragam keilmuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. 4. Otonomi kelembagaan yaitu sekolah menjadi dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

3.	Pola pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pendidikan yang dilaksanakan yakni model boarding school dengan mengintegrasikan antara pendidikan formal dan asrama yang menitikberatkan pada pembentukan akhlakul karimah; 2. Pendidikan wawasan kebangsaan guna menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air; 3. Pendidikan ekstrakurikuler dengan mengolah hasil alam sekitar menjadi produk.
4.	Faktor-faktor yang menjadi kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala geografis; 2. Kendala sarpras; 3. Kendala SDM; 4. Dekadensi cinta tanah air; 5. Minimnya kesadaran masyarakat; 6. Minimnya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah; 7. Kendala religiusitas

D. Realitas dan Potret Strategi Pengembangan

Pendidikan Wilayah Perbatasan KALTARA

Berikut penulis akan memaparkan hasil temuan dan menganalisisnya berkaitan dengan strategi pengembangan pendidikan wilayah perbatasan. Ada empat hal yang akan menjadi focus pemaparan, yaitu: strategi sekolah dalam melakukan pengembangan, strategi membangun kemitraan, pola pendidikannya serta faktor-faktor yang menjadi kendala, berikut pembahasannya.

1. Strategi Sekolah dalam Melakukan Pengembangan

Strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh wadah atau tempat guna proses suatu perubahan berencana yang memerlukan dukungan semua pihak, antara lain Kepala

sekolah, guru, dan siswa dengan perubahan-perubahan itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan lembaga pendidikan, yang memerlukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang. Termasuk dalam penelitian ini, yakni strategi pengembangan pendidikan di perbatasan, maka dibutuhkan pula upaya-upaya dalam pengembangan lembaga pendidikannya.

Sekolah selama ini telah berupaya untuk dapat merekrut para calon siswa yang berasal dari daerah perbatasan. Maksudnya adalah bahwa yang sebagian besar dari calon siswa tersebut berasal dari anak yang orang tuanya bekerja dengan cukong-cukong di perkebunan Malaysia. Yang menjadi pemikiran mendasar kami selama ini, bahwa anak-anak usia sekolah yang berada di camp-camp tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan cenderung diabaikan oleh orang tua mereka. Belum lagi kondisi akhlak anak yang bisa dikatakan mendapatkan pengaruh buruk karena lingkungannya yang buruk, dan terutama pengetahuan agama Islam mereka yang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan orang tuanya yang juga sudah tidak memperhatikan bahkan tidak paham tentang aturan agama (syari'at Islam). Di lingkungan camp bahkan sudah kerap dijumpai anak-anak sudah mulai mengenal judi, ngellem dan juga perilaku kasar yang sering terjadi diakibatkan orang tua mereka yang kerap bertindak kasar. Tetapi masalah yang paling mendasar adalah bahwa rendahnya pengetahuan agama anak karena orang tua yang juga memiliki pengetahuan minim serta kurang peduli dengan hukum agama. Dari hasil wawancara penulis, bahwa ada yang menikah beda agama. Oleh karena itu, hadirnya sekolah tapal batas ini kami harapkan dapat memberikan hak-hak pendidikan bagi anak-anak TKI usia sekolah dari tingkatan PAUD sampai MI dengan harapan akhlak mereka dapat terbina dan mereka mengenal aturan agama Islam. Selama ini strategi yang kami lakukan adalah mencoba mengajak anak-anak TKI untuk mau bersekolah di sekolahan kami dengan cara mendatangi camp-camp yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia. Memang awalnya banyak orang tua yang menolak karena susahnya proses administrasi keluar-masuk di pos-pos penjagaan perbatasan. Tetapi kami terus meyakinkan secara persuasif bahwa pendidikan, khususnya pendidikan agama sangat penting bagi masa depan anak. Yang kedua kami memberuikan sekolah gratis tanpa memungut biaya sepeserpun, bahkan guru-guru yang mengajarpun tidak digaji, semata-mata lillahi ta'ala. Selanjutnya pihak sekolah telah berupaya untuk membangunkan asrama-asrama bagi siswa yang ingin tinggal di lingkungan sekolah, cuman yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana serta fasilitas yang ada. Akan tetapi beberapa warga juga sudah ada yang menunjukkan kepedulian untuk memberikan sumbangan, dan dalam waktu dekat ini telah dibuat cikal-bakal kolam ikan untuk pemenuhan kebutuhan santri.

Berdasarkan temuan ini, penulis dapat membaca orientasi pendidikan dari Ibu Juraidah selaku kepala sekolah yakni pendidikan *boarding school*. Hal ini dapat dilihat bahwa model penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut telah memadukan dua kategori yakni sekolah formal dengan asrama. Menurut penulis, strategi ini cukup relevan mengingat bahwa, jarak tempuh anak-anak yang bersekolah terbilang jauh dengan medan yang cukup berbahaya melintasi perbatasan tanpa permit. Hadirnya *boarding school* ini tentu akan lebih meringankan beban anak dan juga dapat lebih mengintensifkan proses belajar dan pembinaan di luar jam formal. Selain itu strategi pengembangan juga merambah pada masalah muatan kurikulum yang lebih memfokuskan pada pendidikan akhlakul karimah. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Ibu Juraidah selaku Kepala Sekolah membangun kemitraan untuk menghadirkan SDM berkualitas guna membina keagamaan siswa. Selain itu juga, Ibu Juraidah telah mendapat bantuan sarpras untuk pengembangan ekstrakurikuler berupa peralatan membuat *snack* dari hasil alam seperti pisang dan singkong.

2. Strategi Sekolah dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Salah satu upaya yang kami lakukan untuk keberlangsungan sekolah tapal batas ini adalah membangun kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan-perusahaan swasta, hingga yang bersifat personal. Keberadaan sekolah tapal batas ini bisa tetap ada dan eksis dikarenakan peran masyarakat dalam hal ini mitra sekolah. Beberapa sarana dan prasarana dapat terbangun berkat bantuan dari berbagai pihak. Di antara pihak-pihak yang menjadi mitra selain pemerintah dalam hal ini selain Diknas dan kementerian Agama Kaltara, antara lain: Perusahaan Pertamina, Yayasan Yusuf Kalla (bahkan beberapa waktu yang lalu, Ibu Juraidah sempat diundang dan hadir di Jakarta), Pesantren Darul Qur'an (Daqu) Yayasan KH. Yusuf Mansyur yang mengirim ustadnya untuk membantu proses pembelajaran di sekolah ini. Ada juga beberapa LSM yang turut memberikan dukungan dan mencoba mencari mitra untuk keberlangsungan sekolah ini. Selain itu keberadaan TNI diperbatasan juga turut membantu kegiatan pembelajaran di sekolah seperti memberikan pelatihan baris-berbaris dan upara bendera. Beberapa perguruan tinggi pun pernah terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di perbatasan seperti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UNMUL Samarinda.

Dalam membangun kemitraan, setidaknya ada 4 strategi yang dapat diterapkan merujuk pada hasil temuan penelitian S. Alil Jadid al Idrus, yaitu akuntabilitas, relevansi, kualitas dan otonomi kelembagaan.⁷¹ Akuntabilitas yaitu bagaimana sekolah dapat membaca dan memotret kebutuhan masyarakat serta pelibatan mereka dalam akan pendidikan. Relevansi yaitu, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentukan siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kualitas yaitu sekolah dapat menghadirkan model penyelenggaraan

⁷¹ S. Alil Jadid Al Idrus, "Model Strategi Kemitraan pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MAN 2 Mataram)", Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 2, November 2017, hlm. 22.

pendidikan yang dapat merubah anak didik menjadi lebih baik, dalam konteks pendidikan perbatasan pemberdayaan anak dengan ragam keilmuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Otonomi kelembagaan yaitu sekolah menjadi dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam penelitian ini, bahwa Ibu Juraidah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan sekolah tapal batas bagi anak-anak TKI di perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa telah dilakukan proses identifikasi sebagai kegelisahan awal akan krisis pengetahuan agama yang dimiliki oleh anak-anak TKI perbatasan serta rendahnya rasa nasionalisme yang dimiliki. Selanjutnya didirikan sekolah tapal batas, sebagai *follow up* dari impian serta perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan sekolah menjadi salah satu pelopor kepedulian pendidikan bagi anak-anak di wilayah perbatasan dengan segala keterbatasannya.

3. Pola Pendidikan yang Diterapkan di Wilayah Perbatasan

Berdasarkan temuan penulis, di sekolah tersebut memiliki *background* madrasah yang merupakan sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah yaitu Kemenag. Selain itu ada juga pendidikan pesantrennya yang dilaksanakan di luar jam formal. Untuk kegiatan pesantren ini didukung oleh Ustadz yang dikirim oleh KH. Yusuf Mansyur untuk memberikan pembinaan keagamaan. Selain itu, untuk menopang pengetahuan agama Islam siswa, kami juga memberikan kegiatan *ex-school* yaitu Pembinaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Wawasan Kebangsaan (PKn) untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, Pramuka dan latihan baris-berbaris yang dibina oleh bapak-bapak TNI. Yang menarik menurut penulis adalah, bahwa sekolah ini mencoba meramu model *Boarding School* dengan berbagai keterbatasannya. Bahkan dari hasil observasi, terdapat asrama bagi

siswa dan untuk siswa putri langsung di bawah pengawan kepala sekolah yakni Ibu Juraidah.

4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengembangkan Sekolah
- Berdasarkan observasi penulis memang banyak sekali kekurangan pada sekolah tersebut. Berhubung sekolah ini berlokasi jauh diperbatasan, bahkan akses untuk ke sini saja terbilang jauh, tentunya banyak sekali kekurangan yang dimiliki. Walaupun demikian, kami tetap optimis dan bersemangat karena ini kami lakukan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah untuk mendidik anak bangsa, karena masih sedikit orang mau peduli dengan kondisi anak-anak TKI di perbatasan Malaysia-Indonesia. Selain itu keterbatasan sarpras, walaupun sudah ada beberapa sumbangan yang turut melengkapinya, tetapi jika merujuk pada standar pendidikan nasional masih dikatakan kurang memenuhi syarat. Selain itu, faktor kesadaran orang tua yang masih minim karena mereka lebih mementingkan untuk dapat menghasilkan uang dengan bekerja ketimbang menyekolahkan anaknya sebagai investasi jangka panjang. Hal ini senada dengan hasil temuan penelitian Aylin A'ing yang menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi kendala dalam manajemen pendidikan di sekolah perbatasan Malinau, yakni kesadaran orang tua, sarpras dan letak sekolah yang jauh.⁷²

Sedangkan menurut Iskandar Agung, bahwa penting untuk menyisipkan pendidikan wawasan kebangsaan untuk menanamkan cinta tanah air, karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ada kecenderungan anak-anak Indonesia untuk bersekolah di Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan.⁷³ Sedangkan dalam penelitian penulis juga menemukan bahwa sekolah di wilayah Indonesia merupakan pilihan alternative setelah mereka tidak diterima di sekolah-sekolah Malaysia.

⁷² Aylin A'ing, "Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau", eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015, hlm. 556-557.

⁷³ Sikandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan", Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2, Desember 2012, hlm. 173-184.



Jika dalam menurut Lia Rosliana dkk., ada berbagai isu penting di perbatasan, antara lain: isu batas negara pertahanan dan keamanan daerah perbatasan, isu kelembagaan, isu perekonomian masyarakat, isu pendidikan, isu infrastruktur, isu potensi daerah, maka dalam temuan penulis dapat digambarkan beberapa isu yang juga mencuat yaitu, isu religiusitas (baca: penanaman nilai-nilai Islam) yakni krisis pengetahuan agama anak serta moralitas mereka. Pengetahuan agama ini jika dilihat dalam perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut penulis, akan berpengaruh terhadap pola ibadah mereka baik ibadah secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal implementasi ajaran agama mereka kepada Allah SWT terbilang rendah karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki baik untuk masalah fikihnya maupun tauhidnya. Minimnya pengetahuan ini akan berimplikasi pada kesadaran untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten. Secara horizontal, ibadah sosial anak-anak juga tergambar dalam prilakunya, disebabkan minimnya pengetahuan agama bertalian dengan masalah akhlakul karimah. Hal ini dapat dilihat, dengan cara berbicara serta prilaku mereka yang terbilang kurang sopan (baca: kasar).

Secara holistik pembahasan hasil temuan penulis dapat digambarkan pada table berikut:

NO.	ASPEK YANG DIGALI	DESKRIPSI TEMUAN
1.	Strategi sekolah dalam melakukan pengembangan	Strategi yang dikembangkan yaitu <i>boarding school</i> . Model penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut telah memadukan dua kategori yakni sekolah formal dengan asrama. Menurut penulis, strategi ini cukup relevan mengingat bahwa, jarak tempuh anak-anak yang bersekolah terbilang jauh dengan medan yang cukup berbahaya melintasi perbatasan tanpa permit. Hadirnya <i>boarding school</i> ini tentu akan lebih meringankan beban anak dan juga dapat lebih mengintensifkan proses belajar dan pembinaan di luar jam formal.

2.	Strategi membangun kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas yaitu bagaimana sekolah dapat membaca dan memotret kebutuhan masyarakat serta pelibatan mereka dalam akan pendidikan. 2. Relevansi yaitu, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentukan siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 3. Kualitas yaitu sekolah dapat menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang dapat merubah anak didik menjadi lebih baik, dalam konteks pendidikan perbatasan pemberdayaan anak dengan ragam keilmuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. 4. Otonomi kelembagaan yaitu sekolah menjadi dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
3.	Pola pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pendidikan yang dilaksanakan yakni model boarding school dengan mengintegrasikan antara pendidikan formal dan asrama yang menitikberatkan pada pembentukan akhlakul karimah; 2. Pendidikan wawasan kebangsaan guna menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air; 3. Pendidikan ekstrakurikuler dengan mengolah hasil alam sekitar menjadi produk.
4.	Faktor-faktor yang menjadi kendala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala geografis; 2. Kendala sarpras; 3. Kendala SDM; 4. Dekadensi cinta tanah air; 5. Minimnya kesadaran masyarakat;



		6. Minimnya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah; 7. Kendala religiusitas
--	--	--

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan bencana. Adapun strategi yang direncanakan untuk kawasan perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari ujung barat hingga timur berimplikasi pada banyaknya titik-titik wilayah perbatasan yang bersinggungan dengan negara-negara tetangga. Meskipun merupakan wilayah terdepan yang menjadi pintu gerbang negara, namun tidak semuanya wilayah tersebut mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Seringkali karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan lokasinya yang relatif terpencil menyebabkan wilayah perbatasan tidak mendapat sentuhan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Padahal penduduk di wilayah itu juga merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang layak terhadap kedua kebutuhan tersebut. Tanpa pemberian akses pendidikan dan kesehatan yang memadai maka wilayah perbatasan akan tetap akan terbelakang

dan termarginalkan (Zein, 2015). Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 (2013:79) disebutkan bahwa dibutuhkan strategi akselerasi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah tersebut. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada setiap warga Negara dimanapun mereka berada di NKRI ini.

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut.

1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah Perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TKSD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana; dan
3. Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan nonformal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 361 disebutkan bahwa pemerintah pusat dengan dibantu oleh pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga. Meski demikian, implementasi untuk memenuhi hak pendidikan dan hak kesehatan bagi masyarakat perbatasan tidak semudah yang dibayangkan. Pemerintah daerah seringkali belum memiliki kapasitas yang memadai, khususnya terkait masalah kewenangan administrasi dan kompleksitas pembangunan yang melibatkan banyak pihak. Sementara



dari segi peraturan perundang-undangan juga belum seragam dan terkesan tumpang tindih. Paradigma pengelolaan perbatasan harus bergeser dari yang semula berorientasi pada *security approach* menjadi *prosperity approach* (Zein, 2015). Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan, (Yasir, 2012) adalah :

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Dikutip dari Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015 320 Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara Lia Rosliana, Fani Heru W, Wildan Lutfie, Kemal Hidayah dan Tri Noor Aziza

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada berikut kelengkapannya. Peran pendidikan sebagai prima mover dalam proses pembangunan (Mardiana, 2006: 12). Secara fisik, pendidikan berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari segala strata dan segala bidang bagi pembangunan. Sedangkan dari aspek nonfisik, pendidikan berhasil menanamkan semangat dan jiwa modern, yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan yang tinggi pada "akal" dan teknologi, demi menciptakan masa depan yang didambakan (Zamroni, 2003: 10 dalam Brahmantiyo, 2007) Selain para guru, Zakso (2010) juga menyebutkan bahwa orang tua dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pembaharuan pendidikan. Bentuk utama dari keterlibatan orang tua mencakup:

- a. Keterlibatan langsung di sekolah (seperti sebagai sukarelawan atau asisten)
- b. Keterlibatan orang tua dalam aktivitas pembelajaran anak di rumah
- c. Relasi sekolah orang tua atau masyarakat.
- d. Badan penasehat pendidikan.

Sejalan dengan itu, Wahyudi (2014) menyebutkan bahwa pada hakekatnya hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Dimensi kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk: memelihara kelangsungan hidup sekolah ; meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; memperlancar kegiatan pembelajaran; memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Sedangkan dimensi kebutuhan masyarakat, tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memperoleh kemajuan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat; menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya. Adapun inovasi pendidikan adalah upaya perbaikan, perubahan, pembaharuan, terobosan, penemuan dalam bidang pendidikan guna memecahkan masalah pendidikan, sehingga pendidikan berkembang kepada yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Sehingga inovasi pendidikan dapat dinyatakan sebagai suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi atau diskoveri, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau

untuk memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988) Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan.

Dengan kata lain, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi maupun discovery untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988:51) Proses pembaharuan secara sederhana digambarkan Fulan (Zakso, 2010), ke dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Inisiasi. Pada tahapan ini ada delapan hal yang perlu mendapat perhatian, yakni: eksistensi dan kualitas inovasi; akses terhadap inovasi; advokasi dinas pendidikan; advokasi para guru; agenagen pembaharuan eksternal; tekanan masyarakat; kebijakan baru termasuk pendanaan baik pada level pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, serta; pemecahan masalah dan orientasi birokratis Proses inisiasi dalam pembaharuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: relevansi, kesiapan dan ketersediaan sumber-sumber. Idealnya proses inisiasi ini didasarkan atas ketiga hal tersebut, bukan salah satu atau beberapa di antaranya.
 - b. Implementasi. Proses pelaksanaan program inovasi bersifat lebih intrikitis karena melibatkan banyak orang dan karena pembaharuan itu sendiri. Banyak kebijakan yang inovatif hanya bagus pada tataran konseptual, namun sulit diimplementasikan.
2. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam

pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Bukan itu saja, sebagian guru di daerah perbatasan bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Bagi daerah perbatasan jika pendidikan guru dijadikan sebagai kelayakan mengajar, maka akan menambah banyaknya sekolah yang tidak mempunyai guru, karena tidak adanya SDM yang tersedia. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan. Dengan pendapatan yang rendah banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/ atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

4. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena hanya tingkat pendidikan itu saja yang tersedia. Selain itu sosial budaya masyarakat juga cukup berperan. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentukan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.





BAB V

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI PERBATASAN INDONESIA (IKHTIAR PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN)

A. *Best Practicess* Bidang Inovasi Pendidikan di Daerah Perbatasan

Lesson Study merupakan program perbaikan kualitas pembelajaran yang disebarluaskan di Indonesia dengan sistem *Top-down*. Pemerintah bekerjasama dengan universitas terkemuka di Indonesia menyebarkan pola pembinaan guru dengan melalau pelatihan, hibah, dan pendampingan. Sebagai program rintisan, penyebarluasan pola pembinaan dan perbaikan kualitas pembelajaran melalui *Lesson Study* secara bertahap menyentuh guru-guru di berbagai wilayah, baik melalui sekolah sebagai pelaksana, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan forum guru untuk jenjang SMP, SMA atau SMK, ataupun KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan forum untuk guru-guru SD. Oleh karena itu, guru-guru di daerah perbatasan juga layak untuk mendapatkan pelatihan yang sejenis. Dengan mencoba menerapkan diiringi pendampingan secara serius, bukanlah yang mustahil pelaksanaan pola pembinaan kualitas pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar selayaknya di daerah lain di Indonesia (Darmayasa, 2015).

Selain *Lesson Study*, *Best Practicess* yang lain adalah Sekolah Kebangsaan, sekolah kebangsaan model ini menampung aspirasi baru tentang Pendidikan Menengah Sekolah Kebangsaan daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah perbatasan dengan mencoba memodifikasi pola kurikulum, dengan model pembelajaran yaitu kurikulum pendidikan yang memiliki muatan kebangsaan seperti pembelajaran *living history* dan nilai nilai kejuangan berbasis karakter dan *life skill* berjiwa bela negara dengan memperhatikan keunggulan lokal yang dimiliki di daerah perbatasan, sehingga dapat diterapkan sebagai suatu proses dan model pembelajaran yang layak dan sesuai dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Model ini menekankan masalah pendidikan di daerah tertinggal dan daerah Perbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan pendidikan menengah perbatasan daerah lainnya di Indonesia. *Best Practicess* lain yang dilakukan oleh Asriati (2013) dengan berangkat dari kondisi pendidikan di perbatasan Kalimantan Barat seperti: masih tingginya angka putus sekolah, banya kanak yang terpaksa tidak sekolah akibat ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu, korban *trafficking*, korban narkoba dan atau HIV/AIDS; motivasi untuk menyekolahkan anak kurang serta fasilitas pendidikan yang sedikit dan relatif jauh dari jangkauan warga, maka Asriati (2013) mencoba membuat desain model pengembangan pendidikan menengah layanan khusus yang dikelola secara khusus dan dapat diterapkan di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai standar mutu yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak berorientasi pada kelas-kelas regular namun kurikulum baru yang mengarah pada kecakapan hidup (*life skill*) yang dapat dijadikan mata pencaharian pokok peserta didik setelah tamat.

B. *Best Practicess* Inovasi Pendidikan di berbagai

Daerah

Adapun inovasi pendidikan yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah diantaranya adalah:



1. Inovasi Pendidikan Kota Surabaya

a. Raport Online

Inovasi rapor online ini pertama kalinya dilakukan di Indonesia yang diterapkan mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK sejak tahun 2014. Inisiasi inovasi ini awalnya dilakukan dengan memetakan persoalan-persoalan apa saja yang terjadi di lapangan. Hasilnya secara garis besar ada pada proses pembelajaran, cara memberikan penilaian, dan bagaimana cara melaporkan penilaian tersebut mengingat dalam Kurikulum 2013 dituntut *authentic assessment* yaitu memotret senyata-nyatanya penilaian peserta didik. Maka diterapkanlah sistem Rapor Online dengan format penilaian kuantitatif, kualitatif, mulai dari pengetahuan, keterampilan, hingga afeksinya secara berkelanjutan. “Jadi guru setelah selesai mengajar langsung input penilaiannya. Ada batas waktu input juga sehingga tidak ada penyalahgunaan nilai murid. Ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi penilaian anak. Spirit menggunakan rapor *online* ini adalah ingin meningkatkan layanan kepada orang tua untuk mengakses informasi yang berkelanjutan mengenai perkembangan anak dari waktu ke waktu. Rapor *Online* ini juga, kata dia, terus digunakan sebagai rekaman evaluasi peserta didik sesuai NISN untuk tiap jenjang pendidikan. Satu tantangannya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tinggi (TIK). Guru wajib menguasai TIK untuk mempermudah memasukkan evaluasi peserta didik ke dalam format Rapor *Online*.

b. Layanan Pendidikan dengan Sekolah Kawasan

Banyak faktor yang menjadi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, terutama faktor geografis. Kebanyakan sekolah unggulan negeri atau sekolah kualitas terbaik terkonsentrasi di pusat kota. Atas dasar tersebut, pemerintah kota Surabaya berinovasi mengembangkan konsep Sekolah Kawasan (*Cluster School*). Konsep Sekolah Kawasan yang diterapkan sejak

tiga tahun lalu yaitu sejak Tahun 2011 dan ternyata mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Konsepnya adalah mengkloning sekolah bagus di kawasan-kawasan selain pusat kota. Contohnya, SMA 5 Surabaya sebagai sekolah unggulan dikloning di kawasan barat, timur, selatan, utara, dan tengah. Kloning ini adalah dalam segi kualitas, potensi, pendidik, sarana prasarana sehingga mempunyai standar yang sama dengan sekolah unggulan. Untuk menerapkan konsep Sekolah Kawasan, Dinas mencari sekolah yang strategis di masing-masing kawasan dan mempunyai potensi yang baik mulai jenjang SD sampai dengan SMA. Adapun pola kerjanya adalah pertama, untuk menjangkau input yang baik, peserta didik hanya diberi kesempatan memilih satu sekolah di luar kawasan tempat tinggalnya (lintas kawasan). Kedua, dari pola perekrutan dan pembinaan pendidik, untuk membentuk sekolah berkualitas maka dibutuhkan guru yang berkualitas juga, sehingga dilakukan mutasi untuk memilih guru yang bagus. Guru di potret melalui uji kompetensi, dan diberi ruang melalui diklat dan pengembangan diri sehingga memenuhi kualifikasi untuk mengajar di sekolah kawasan. Kepala Sekolah juga diseleksi dan menandatangani kontrak kinerja dalam empat tahun untuk berkomitmen meningkatkan kualitas sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah Kawasan.

2. Inovasi Pendidikan Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar melakukan distribusi gadget bagi seluruh siswa di Kota Blitar dalam rangka inovasi pembelajaran di bidang pendidikan. Sehingga diharapkan seluruh pembelajaran tidak hanya menggunakan media buku tetapi juga media virtual. Tahap pertama, Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan 525 tablet. Prioritasnya adalah siswa kurang mampu dan berprestasi. Sisanya akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015. Ditargetkan, akhir tahun 2015 ini seluruh siswa di semua jenjang sudah bisa mendapat tablet.



3. Inovasi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 telah melakukan inovasi di bidang pendidikan dengan meluncurkan situs Rumah Belajar. Situs Rumah Belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas dapat diakses di alamat: <http://belajar.kemdiknas.go.id>, dimana situs ini dirancang menjadi rumah belajarnya para insan pendidikan, baik guru maupun peserta didik. Portal ini merupakan salah satu inovasi pendidikan dimana untuk belajar, peserta didik maupun guru bisa mengakses dimanapun. Di portal Rumah Belajar ini terdapat bermacam konten antara lain RPP, Materi, Bahan pembelajaran interaktif, Modul, Forum guru, Forum Siswa, Bank soal dan lain lain. Konten tersebut dikelompokkan per jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi. Di Rumah Belajar juga terdapat fasilitas *live streaming* TV Edukasi dan Radio Suara Edukasi.





BAB VI

PENUTUP

Strategi yang dikembangkan yaitu *boarding school*. Model penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut telah memadukan dua kategori yakni sekolah formal dengan asrama. Menurut penulis, strategi ini cukup relevan mengingat bahwa, jarak tempuh anak-anak yang bersekolah terbilang jauh dengan medan yang cukup berbahaya melintasi perbatasan tanpa permit. Hadirnya *boarding school* ini tentu akan lebih meringankan beban anak dan juga dapat lebih mengintensifkan proses belajar dan pembinaan di luar jam formal.

Strategi sekolah dalam membangun kemitraan yakni dengan mengembangkan 4 hal, yaitu: relevansi yaitu, bahwa pendidikan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap bentukan siswa ketika mereka bersekolah baik pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Kualitas yaitu sekolah dapat menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang dapat merubah anak didik menjadi lebih baik, dalam konteks pendidikan perbatasan pemberdayaan anak dengan ragam keilmuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Otonomi kelembagaan yaitu sekolah menjadi dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Pola pendidikan yang diterapkan di wilayah perbatasan yang diterapkan antara lain, pendidikan wawasan kebangsaan guna menanamkan kecintaan

terhadap NKRI karena rentannya pergeseran sikap dan patriotisme di wilayah perbatasan. Mengingat bahwa, di wilayah perbatasan Indonesia yang sangat memperhatikan dengan fasilitas yang terbatas, akan sangat mudah menggoyahkan rasa cinta tanah air utamanya bagi anak-anak TKI. Selain itu menanamkan pendidikan agama khususnya bagi anak usia sekolah dasar, karena minimnya pendidikan agama yang mereka terima di camp-camp tempat orang tua mereka bekerja, utamanya pendidikan akhlakul karimah. Di lingkungan tempat tinggal mereka sudah terbiasa mendengarkan perkataan serta menerima perilaku kasar termasuk kesadaran akan mengamalkan ajaran agama yang masih rendah.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan sekolah yaitu faktor geografis karena infrastruktur yang sangat terbatas serta jarak yang cukup jauh. Selain itu, minimnya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, karena kesadaran para calon tenaga pendidik dan kependidikan untuk mau mengabdikan di wilayah perbatasan. Selain itu ketersediaan sarana yang kurang memadai. Selain itu adanya degradasi cinta tanah air, problem religiusitas serta minimnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anonymous, *Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam: 2004.

Arifin, H. M., *Ilmu pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan raktis Berdasarkan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Bryson, John M, *Perencanaan Strategis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet II, 1989.

Echols, John M., Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Gaffar, M. Fakry, *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi, Jakarta: PPLPTK, 1987.

Husein Umar, *Strategic Management in Action*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Mastuhu, *Menata ulang Pemikiran; Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.

Nimran, Umar, *Perilaku Organisasi*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 109.

Roslina, Lia dkk., "Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara", *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2015.

- Rusyah, Tabrani, Atang K. BA, Zainal A, *Penekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1992.
- Suandy, Erly, *Perencanaan Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Suyanto, M., *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Tilaar, H.A.R., *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka 2005.

JURNAL

- A'ing, Aylin, "Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau", *eJournal Pemerintahan Integratif*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2015.
- Agung, Sikandar, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan", *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2*, Desember 2012.
- Al Idrus, S. Alil Jadid, "Model Strategi Kemitraan pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MAN 2 Mataram)", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 5, Nomor 2, November 2017.
- Iskandar Agung, "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Wilayah Perbatasan", *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI - Vol. 7, No.2*, Desember 2012.

INTERNET

- Nukleus Smart, "Konsep Dasar Penerapan Standar Sistem Pendidikan", file:///http/konsep-dasar-penerapan-standar-sistem.html.
- Syamsul Hadi Rukkiyah. *Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah Nasional Berstandar Internasional*.file:///http/standar-nasional-pendidikan-dan-sekolah.html/.



Yuliana Rita dan Tuti Rahma, "Perbandingan PP Nomor 19 Tahun 2005 dengan PP Nomor 23 Tahun 2013", https://www.academia.edu/5404030/Perbandingan_PP-19-2005_dan_PP-32-2013.

